

**PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2001-2015**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana

Ekonomi (S1)

Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun oleh:

Cristniati Rahmadani

NPM : 13 11 20105

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA,
FEBRUARI 2018**

Skripsi

**PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2001-2015**

Disusun oleh :

Cristniati Rahmadani

NPM : 13 11 20105

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing



Dr. Y. Sri Susilo, M.Si

6 Februari 2018

Skripsi

**PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2001-2015**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

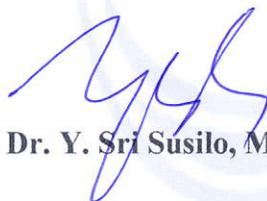
Cristniati Rahmadani

NPM : 13 11 20105

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal 6 April 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan

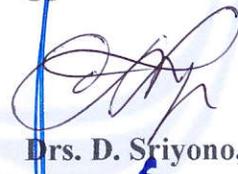
SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Panitia Penguji

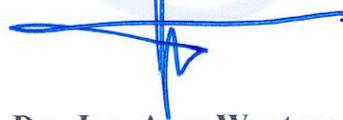


Dr. Y. Sri Susilo, M.Si.

Anggota Panitia Penguji



Drs. D. Sriyono, M.Si.



Drs. Ign. Agus Wantara, M.Si.

Yogyakarta, 6 April 2018

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2001-2015**

Benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dan catatan perut dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 6 Februari 2018

Yang menyatakan,



Cristniati Rahmadani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001-2015”**. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Berkat bimbingan, arahan, dukungan, petunjuk serta kerjasama dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Y. Sri Susilo, M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, tenaga, bantuan dan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
2. Ibu Yenny Patnasari, S.E., M.Si. dan Bapak Drs. Sigit Triandaru., M.Si., Ph.D selaku dosen pembahas kolokium yang berkenan memberikan koreksi dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan ini.
3. Bapak Drs. D. Sriyono, M.Si dan Drs. Ign. Agus Wantara, M.Si selaku dosen penguji yang sudah bersedia menyempatkan waktu.
4. Bapak Drs. A. Gunadi Brata, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan.

5. Bapak Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Alex Sandra, Dina Choeri, Feralika Madellu, Isabella Diza dan semua teman-teman mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan.
7. GBI Banjarn, GpdI Hagios Family, dan teman-teman Teebesus atas dukungan dan “tempat” bisa tumbuh bersama dalam kasih Kristus.
8. Sahabat, teman, dan keluarga terbaik KKN 71 WADAS SQUAD, keluarga Bapak Santoso, Jessica, Ignas, Indra, Anton, Clarisa, Lukas, Eva, Artha, Victor, Wastu, Yuricko, Febri, Valen.
9. Teman-teman *student staff* perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2017/2018.

Semua pihak yang terlibat yang tidak memungkinkan penulis menyebutkan satu-persatu yang sudah memberikan dukungan dan dorongan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 6 Februari 2018

Penulis,

Cristniati Rahmadani

MOTTO

Sayangi kedua orang tuamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu! Ingat orang tuamu disana kristalisasi kringat untuk membiayai kuliah kamu! – Drs. Andreas Sukamto., M.Si

Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi (Hosea 6:3b)

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. (Mazmur 23:1-4)

Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan keterdiban (2 timotius 1:7)

One who wants to wear the crown bears the crown

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus

Papa Sunardi

Mama Susana Suwarni

Kakak Sukis Ismawanto

Kakak Jauhari Ismawanto

Kakak Mei W Wulandari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
INTISARI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Hipotesis Penelitian	12
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15

2.1. Pembangunan Ekonomi	15
2.1.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi	15
2.2. Infrastruktur	15
2.2.1. Pengertian Infrastruktur	15
2.2.2. Infrastruktur Ekonomi	16
2.2.3. Infrastruktur Sosial	17
2.2.3.1. Infrastruktur Kesehatan	17
2.2.3.2. Infrastruktur Pendidikan	18
2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	19
2.4. Ketimpangan Pendapatan	20
2.4.1. Pengertian Ketimpangan Pendapatan	20
2.4.2. Berbagai Ukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan	22
2.4.3. Distribusi Pendapatan Menurut Bank Dunia	23
2.4.4. Indeks Gini	23
2.4.5. Indeks Theil dan Indeks-L	24
2.5. Studi Terkait	27
2.6. Kerangka Pemikiran Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Data dan Sumber Data	33
3.2. Model Penelitian	33
3.3. Alat Analisis	35
3.3.1. Uji <i>Common Effect</i>	35
3.3.2. Uji <i>Fixed Effect</i> (Uji Chow)	36

3.3.3. Uji <i>Random Effects</i> (Uji Hausman)	36
3.4. Uji Statistik	37
3.4.1. Uji t	37
3.4.2. Uji F	38
3.4.3. Uji Determinasi (R^2)	39
3.5. Uji Heteroskedastisitas	40
3.5.1. Metode <i>White</i> (<i>The Method of Ordinary Last Squares</i>)	40
3.6. Uji Multikolinieritas	41
3.7. Batasan Operasional	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Hasil	44
4.1.1. Uji Signifikansi Model	44
4.1.2. Uji Signifikansi <i>Fixed Effect</i>	44
4.1.3. Uji Signifikansi <i>Random Effect</i>	46
4.1.4. Uji t	47
4.1.5. Uji F	49
4.1.6. Koefisien Determinasi (R^2)	49
4.1.7. Metode <i>White</i> (<i>The Method of Ordinary Last Squares</i>)	50
4.1.8. Uji Multikolinieritas	50
4.2. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	58

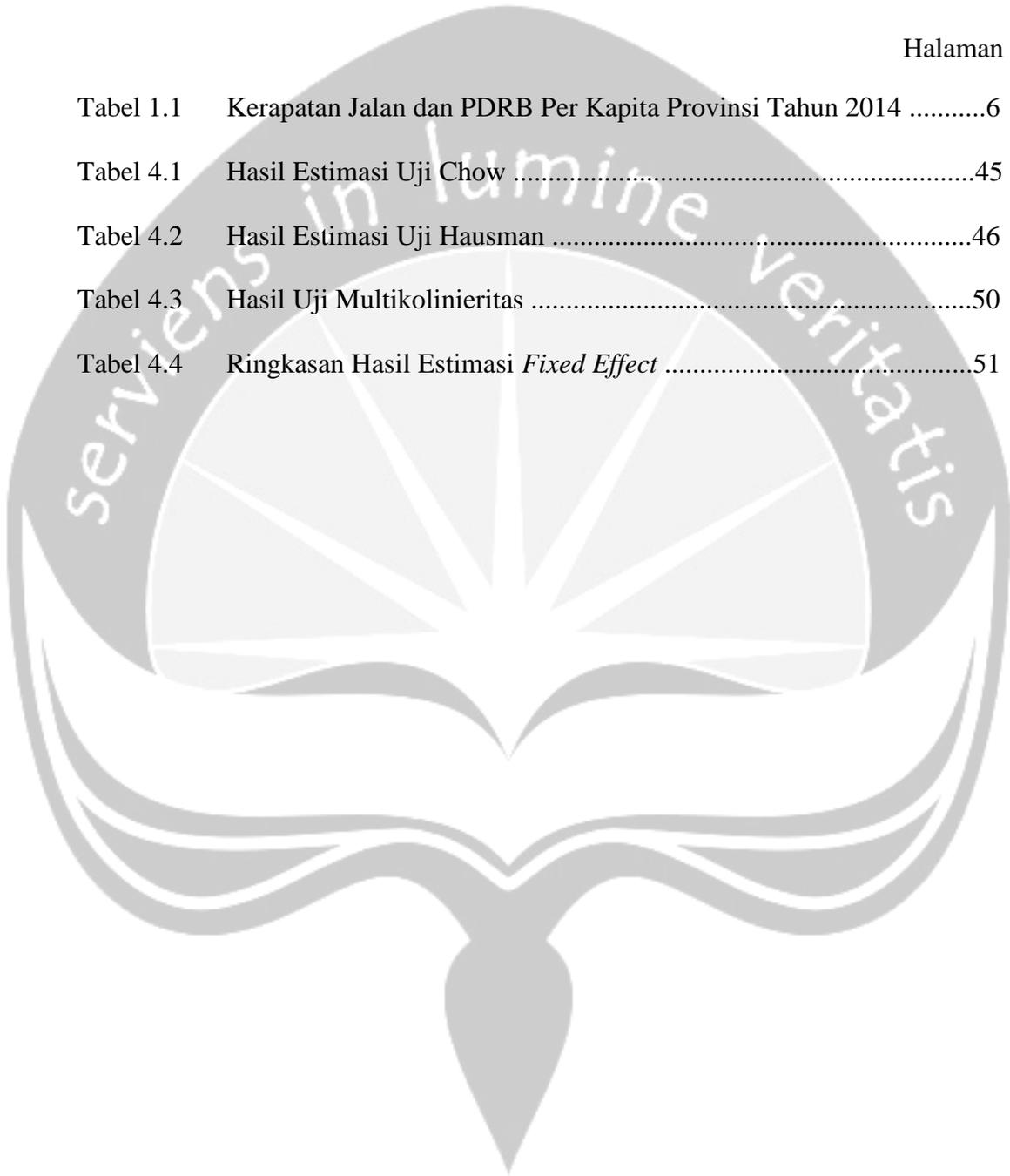
DAFTAR PUSTAKA60

DAFTAR LAMPIRAN64



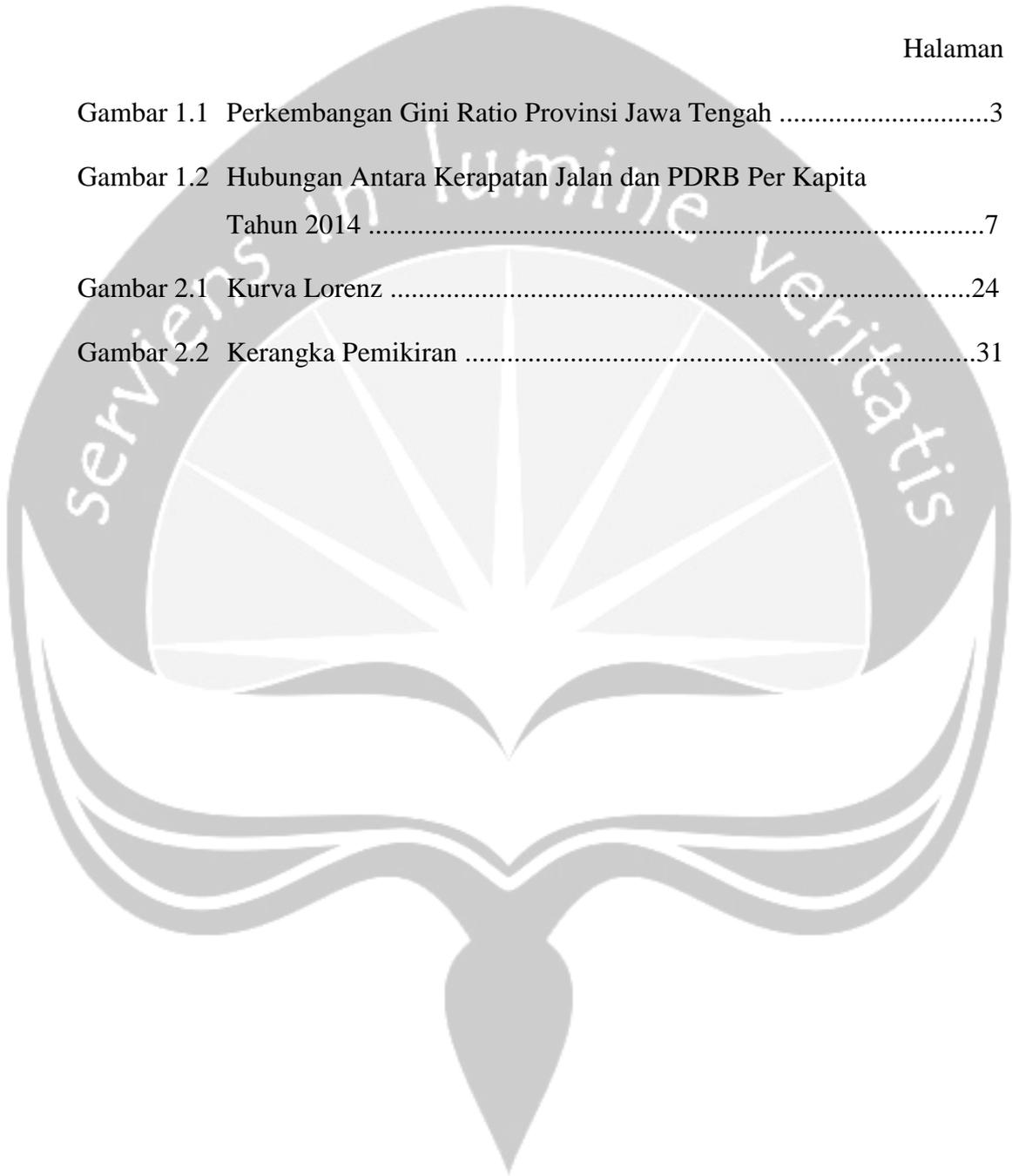
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2014	6
Tabel 4.1 Hasil Estimasi Uji Chow	45
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Uji Hausman	46
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	50
Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i>	51



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Tengah	3
Gambar 1.2 Hubungan Antara Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Tahun 2014	7
Gambar 2.1 Kurva Lorenz	24
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	31



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Estimasi <i>Common Effect</i>	65
Lampiran 2 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i>	66
Lampiran 3 Hasil Estimasi <i>Random Effect</i>	67
Lampiran 4 Hasil Estimasi <i>Chow Test</i>	68
Lampiran 5 Hasil Estimasi Uji Hausman	69
Lampiran 6 Hasil Estimasi Uji Multikorelitas	70
Lampiran 7 Data yang diperoleh (Rasio Gini, Jalan, Rumah Sakit, Gedung Sekolah, <i>Growth</i>)	71

**PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2001-2015**

Disusun oleh:

Cristniati Rahmadani

NPM : 13 11 20105

Pembimbing

Dr. Y Sri Susilo, M.Si.

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2015. Variabel dependen yang digunakan yaitu Indeks Gini. Variabel independen yang digunakan yaitu Jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota), Kesehatan, Pendidikan, dan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) persen. Data yang diperoleh bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan yaitu regresi panel. Data yang dikelola menggunakan program Eviews-8. Kesimpulan yang di dapatkan dari hasil analisis yaitu pengaruh pembangunan infrastruktur jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota), pembangunan infrastruktur pendidikan (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, infrastruktur kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: Pengaruh pembangunan infrastruktur, ketimpangan pendapatan, Jawa Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang disebabkan adanya kenaikan pada tingkat pendapatan penduduk per kapita disuatu Negara dalam jangka panjang (Sukirno, 1985:13). Pembangunan ekonomi disuatu Negara dapat dikatakan berhasil apabila tingkat pertumbuhan ekonomi yang dijalankan stabil serta diiringi dengan berkurangnya tingkat ketimpangan pendapatan di setiap wilayah.

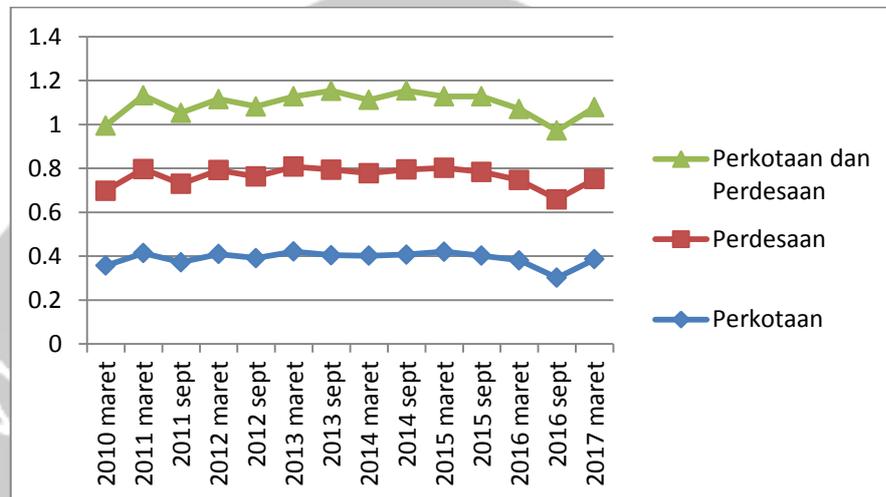
Amrilah (2013:181-189), menyatakan ketimpangan pendapatan dapat terjadi antar individu, sektor maupun daerah. Ketimpangan pendapatan daerah disebabkan adanya perbedaan pada jumlah penduduk, sumber daya yang tersedia dan karakteristik di daerah. Ketimpangan pendapatan dapat digambarkan melalui masyarakat yang bertempat tinggal di daerah maju maupun daerah tertinggal dengan perbedaan tingkat pendapatan. Kesenjangan antar daerah telah menjadi fokus utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat, terutama Indonesia yang merupakan Negara dengan masyarakat majemuk dimana kondisi geografis memiliki pengaruh untuk kegiatan ekonomi disuatu daerah.

Dampak kesenjangan ekonomi berpengaruh terhadap perubahan sosial, kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah dan menurunnya kesejahteraan pada masyarakat. Apabila tingkat ketimpangan yang terjadi semakin tinggi maka tingkat ketidak merataan pendapatan yang terjadi di suatu daerah semakin tinggi.

Ketimpangan pendapatan memiliki kriteria untuk menentukan pola pengeluaran masyarakat pada tingkat yang terendah atau tertinggi dengan menggunakan nilai indeks gini antara 0 dan 1 (BPS, 2013: 15).

Ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah harus memiliki tujuan yang jelas dan tepat dalam penanganannya, karena dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara berkembang tidak terlepas dari tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (*disparity*), biasanya ketimpangan yang terjadi dalam skala lokal dan nasional. Ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah bisa dilihat secara nyata. Ketimpangan distribusi pendapatan seringkali menjadi permasalahan yang serius dan apabila tidak mampu ditangani secara hati-hati untuk mengurangi tingkat kemiskinan menimbulkan masalah pada ekonomi, politik, infrastruktur, dan sosial, serta dalam konteks makro yang dapat merugikan hasil dari pembangunan yang ingin dicapai. Perputaran perekonomian daerah memiliki suatu tujuan dalam kebijakan perekonomiannya, yaitu menciptakan kesejahteraan. Ukuran terpenting dari kesejahteraan salah satunya yaitu pendapatan. Kesejahteraan bisa didapatkan karena terciptanya suatu kegiatan yang menghasilkan, ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan yaitu total pendapatan wilayah maupun rata-rata pendapatan masyarakat. Analisis tingkat regional atau *region* tidak terlepas dari tingkat pendapatan di suatu wilayah. Salah satu ukuran parameter yang paling penting pembangunan wilayah yaitu meningkatnya pendapatan di masyarakat. Parameter lainnya, juga memberikan dampak dalam peningkatan pendapatan, seperti peningkatan pemerataan pendapatan dan lapangan kerja. Terkonsentrasinya suatu kegiatan

ekonomi di daerah perlu mengetahui metode dan alat ukur yang di gunakan untuk menetapkan besarnya pendapatan masyarakat (Tarigan, 2005:13).



Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 2017.

Gambar 1.1
Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.1, menjelaskan tentang terjadinya ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, secara nasional tahun 2010 *Gini Ratio* Jawa Tengah tercatat sebesar 0.341 dan terjadi peningkatan sebesar 0.383 tahun 2011. *Gini Ratio* pada bulan September 2011 menjadi 0.357. Periode bulan Maret 2012 hingga September 2014, nilai *Gini Ratio* berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada bulan September 2013 yaitu sebesar 0.390. Maret 2015 *Gini Ratio* mulai turun menjadi 0.382 dan terus menurun hingga mencapai angka 0.357 pada September 2016 dan naik lagi pada Maret 2017 menjadi 0.365 (BPS, 2017:1).

Berdasarkan wilayah yang ada di Jawa Tengah, nilai *Gini Ratio* pada bulan Maret 2017 sebesar 0.386. Angka ini naik sebesar 0.004 poin dibandingkan *Gini Ratio* September 2016 sebesar 0.382 dan naik sebesar 0.005 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2016 sebesar 0.381. Nilai *Gini Ratio* di pedesaan bulan Maret 2017

sebesar 0.327. Angka ini naik sebesar 0.015 poin dibandingkan pada bulan September 2016 sebesar 0.313 dan naik sebesar 0.004 poin dibandingkan *Gini Ratio* bulan Maret 2016 sebesar 0.323 (BPS, 2017:2).

Hasil Susenas Triwulan I (Maret) 2016, Gini Ratio di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 0,366 yang berarti tingkat ketimpangan sedang. Gini Rasio cenderung stabil selama periode pada tahun 2012-2016. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk selama 5 tahun terakhir pada kondisi yang sama yaitu ketimpangan sedang. Bila dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita perbulan mengalami peningkatan, dari Rp. 695.860 Ribu Rupiah menjadi Rp. 756.720 Ribu Rupiah. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada suatu kelompok masyarakat. Tingkat ketimpangan di Jawa Tengah berbeda dengan Provinsi lain, tingkat ketimpangan Jawa Tengah paling rendah dan yang paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,420 pada Maret 2016 (BPS, 2016:15).

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satu aspek terpenting yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai dengan menurunnya tingkat rasio penduduk miskin (*pro-poor*), penurunan jumlah pengangguran (*pro-job*), penurunan ketimpangan dalam distribusi pendapatan (*pro-equality*), dan pembangunan yang tidak berdampak negatif bagi lingkungan hidup (*pro-environment*). Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan ketersedianya Sumber Daya Manusia (*human capital*) dan modal fisik (*physical capital*). Sektor lain yang mempengaruhi adanya dampak dari

ketimpangan pendapatan menimbulkan upaya dari pemerintah setempat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang memadai, menurut Simon Kuznet pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*), yaitu kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah karena infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung suatu kegiatan ekonomi suatu negara maupun daerah. Ketentuan adanya infrastruktur sangat berpengaruh pada tingkat keefisienan dan keefektifan kegiatan ekonomi yang dilakukan dan merupakan syarat penentu suatu perputaran roda perekonomian yang berjalan dengan baik (Bappeda, 2016:2).

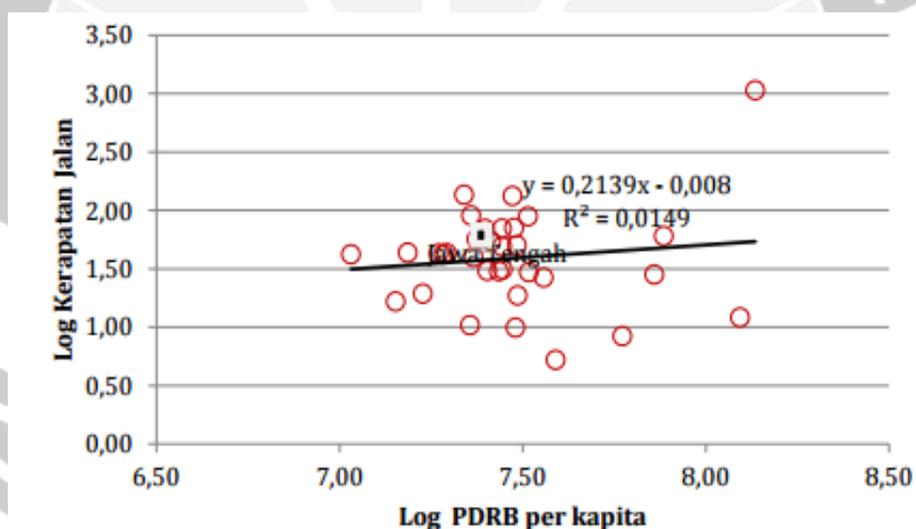
Bank Dunia membagi Infrastruktur menjadi dua bagian yaitu ekonomi dan sosial. Infrastruktur yang mendukung menimbulkan dampak pada kehidupan masyarakat untuk melakukan aktivitas yang berkelanjutan. Kendala yang harus dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah yaitu kualitas pelayanan infrastruktur belum optimal sehingga aktivitas kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, politik, budaya dan pengembangan wilayah menjadi terhambat. Faktor lain yang menyebabkan produktivitas daerah menurun yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang kurang memadai, salah satu dukungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan tingkat pembangunan ekonomi dan sosial yaitu dengan cara membangun infrastruktur ekonomi yang memadai baik infrastruktur ekonomi berupa jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota), sarana infrastruktur sosial berupa tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, serta tersedianya fasilitas infrastruktur pendidikan yang memadai dan tingkat pendapatan daerah yang merata.

Tabel 1.1
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2014

No	Provinsi	PDRB Per Kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan (persen)
1	DKI Jakarta	136.407,58	1068,36
2	D.I Yogyakarta	21.873,72	136,19
3	Bali	29.666,48	133,20
4	Jawa Tengah	22.858,32	90,56
5	Jawa Timur	32.703,80	89,03
6	Banten	29.961,85	70,84
7	Sulawesi Selatan	27.760,65	69,98
8	Jawa Barat	24.961,05	69,55
9	Kepulauan Riau	76.753,11	60,40
10	Lampung	23.648,76	56,85
11	Sumatera Selatan	25.963,24	54,57
12	Sumatera Utara	30.482,59	50,41
13	Sulawesi Selatan	27.804,68	49,14
14	Nusa Tenggara Barat	16.351,54	43,52
15	Bengkulu	19.631,54	43,06
16	Gorontalo	18.627,37	42,76
17	Nusa Tenggara Timur	10.742,42	42,10
18	Sulawesi Barat	19.211,14	41,93
19	Aceh	23.199,49	39,86
20	Sulawesi Tenggara	27.898,14	31,32
21	Sulawesi Tengah	25.316,32	30,38
22	Kalimantan Tengah	27.230,80	30,16
23	Kep Bangka Belitung	32.868,70	29,62
24	Riau	72.331,01	28,27
25	Jambi	36.088,33	26,65
26	Maluku Utara	16.872,31	49,39
27	Sumatera Selatan	30.627,55	18,71
28	Maluku	14.230,08	16,61
29	Kalimantan Timur	123.985,45	12,13
30	Kalimantan Barat	22.707,79	10,42
31	Kalimantan Tengah	30.220,97	9,93
32	Papua Barat	59.156,84	8,40
33	Papua	38.891,99	5,26

Sumber: BPS (2014).

Jaringan jalan yang dimiliki Jawa Tengah sepanjang 29.703 km. Jika melihat dari sisi kualitas, ketersediaan jalan cukup memadai untuk kebutuhan transportasi darat. Hal ini dapat dilihat dari data yang sudah dikelola oleh pemerintah, kerapatan jalan menjelaskan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah dalam satuan kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen. Tabel 1.1, menjelaskan adanya hubungan positif antara tingkat pendapatan perkapita dalam perekonomian dengan tingkat kerapatan jalan, data yang digunakan sebanyak 33 Provinsi di Indonesia. Tingginya tingkat pendapatan per kapita disetiap wilayah menimbulkan tingginya tingkat kerapatan pada jalan.



Sumber: BPS (2014) diolah.

Gambar 1.2
Hubungan Antara Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita
Tahun 2014

Provinsi yang posisinya berada pada dibawah garis kurva linier mengalami penurunan pada infrastruktur jalan. Ukuran ini bisa dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah relatif baik di bandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia karena Jawa Tengah tidak mengalami penurunan pada infrastruktur jalan. Ketersediaan

jaringan jalan bukan menjadi permasalahan utama bagi Jawa Tengah, namun kedepannya pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan lagi. Gambar 1.2, menjelaskan secara kualitas, kondisi ekonomi jalan di Provinsi Jawa Tengah cukup baik, karena 85 persen permukaan jalan sudah beraspal. Permukaan jalan ini berpengaruh pada kinerja di sektor angkutan. Pemerintah melakukan perbaikan dan pelebaran jalan secara terus menerus, hal tersebut dapat dilihat bahwa panjang jalan yang beraspal meningkat serta jalan tanah dan kerikil semakin berkurang. Tahun 2013 terdapat 27.038,56 km jalan beraspal, kemudian tahun 2014 bertambah menjadi 47.480,02 km. Bertambahnya panjang jalan yang signifikan pada tahun 2014 disebabkan telah terbukanya beberapa arus tol baru.

Infrastruktur lain yang dapat mendorong terjadinya produktivitas daerah yaitu adanya infrastruktur sosial, pemerintah membangun infrastruktur sosial yang berupa fasilitas kesehatan dan pendidikan agar masyarakat yang kurang mampu bisa memperoleh hak yang sama seperti masyarakat lainnya yang memiliki pendapatan tinggi. Infrastruktur kesehatan sangat penting di suatu daerah karena dapat meningkatkan kualitas manusia. Ketersedianya sarana kesehatan yang memadai sangat diperlukan supaya status kesehatan dan gizi masyarakat meningkat. Tahun 2015 jumlah rumah sakit yang tersedia di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 276 unit dan rumah sakit bersalin sebanyak 175 unit. Ditambah dengan tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 875 unit di tahun 2015. Selain itu fasilitas lain seperti Posyandu sebanyak 48.615 unit, klinik atau balai kesehatan sebanyak 973 unit dan Polindes sebanyak 5.866 unit (BPS, 2016: 71-72). Tersedianya fasilitas infrastruktur

kesehatan yang memadai sangat diperlukan, karena dapat meningkatkan kualitas manusia dan status kesehatan dan gizi pada masyarakat. Tidak hanya peningkatan pada status kesehatan dan gizi yang baik diperhitungkan untuk generasi sekarang namun juga untuk generasi berikutnya.

Selain infrastruktur kesehatan pemerintah memberikan fasilitas lain yang berupa pendidikan, untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu pertama masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif dalam mengikuti pendidikan baik di jenjang formal (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi) baik di negeri maupun swasta yang berada di bawah pengawasan Kemdikbud, Kemendagri, Institut lain maupun instansi swasta. Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, presentase penduduk yang masih sekolah usia 7-12 tahun (kelompok sekolah dasar) sebesar 99.56 persen, usia 13-15 tahun (kelompok sekolah menengah pertama) sebesar 95.30 persen, umur 16-18 (kelompok sekolah menengah atas) sebesar 67.66 persen, dan umur 19-24 tahun (kelompok perguruan tinggi) sebesar 20.57 persen. Sehingga secara keseluruhan kelompok yang masih sekolah sebesar 70.68 persen dari umur 7-24 tahun. BPS mencatat bahwa masih banyaknya penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah baik di jenjang sekolah dasar sebesar 0.35 persen dan sekolah menengah pertama sebesar 0.48 persen (BPS, 2016: 70).

Program kerja pembangunan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di butuhkan adanya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan yang layak. APK pada jenjang sekolah dasar sebesar 110.36 persen, sekolah menengah pertama sebesar 91.40 persen, dan sekolah menengah pertama sebesar 82.15 persen. Jumlah yang di terima pada tahun ajaran 2014/2015 menurut data dari Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebesar 5.29 juta orang. Jenjang pendidikan baik dalam sekolah dasar terjadi penurunan sebesar 4.06 persen, sekolah menengah pertama sebesar 0.69 persen dan sekolah menengah atas naik sebesar 3.10 persen dibandingkan tahun ajaran sebelumnya (BPS, 2016: 71).

Penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai sangat diperlukan karena fasilitas infrastruktur pendidikan yang memadai sangat berguna untuk meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat agar bisa mengembangkan potensi dirinya, dan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Kemajuan pendidikan merupakan jalan bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, apabila pendidikan gagal dilakukan menimbulkan dampak pada tingkat kemiskinan, kriminal, pengangguran dan lain-lain yang cukup tinggi.

Penelitian ini mengadopsi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bajar, Sumedha., dan Rajeev, Meenakshi (2015) "*The impact of infrastructure provising on inequality: Evidence from India*". Lokasi yang dijadikan bahan penelitian ini terdapat diProvinsi Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur ekonomi jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2001-2015?
2. Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2001-2015?
3. Bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur pendidikan (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2001-2015?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2001-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur ekonomi jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur kesehatan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah perlu membuat satu kebijakan yang tepat agar pengaruh pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Referensi bagi penelitian terkait atau sejenis.

1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pembangunan infrastruktur jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga pembangunan infrastruktur kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Diduga pembangunan infrastruktur pendidikan (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini disajikan sistematika penulisan dari skripsi sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori dan studi terkait terutama hubungan pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

Bab III: Metode Penelitian

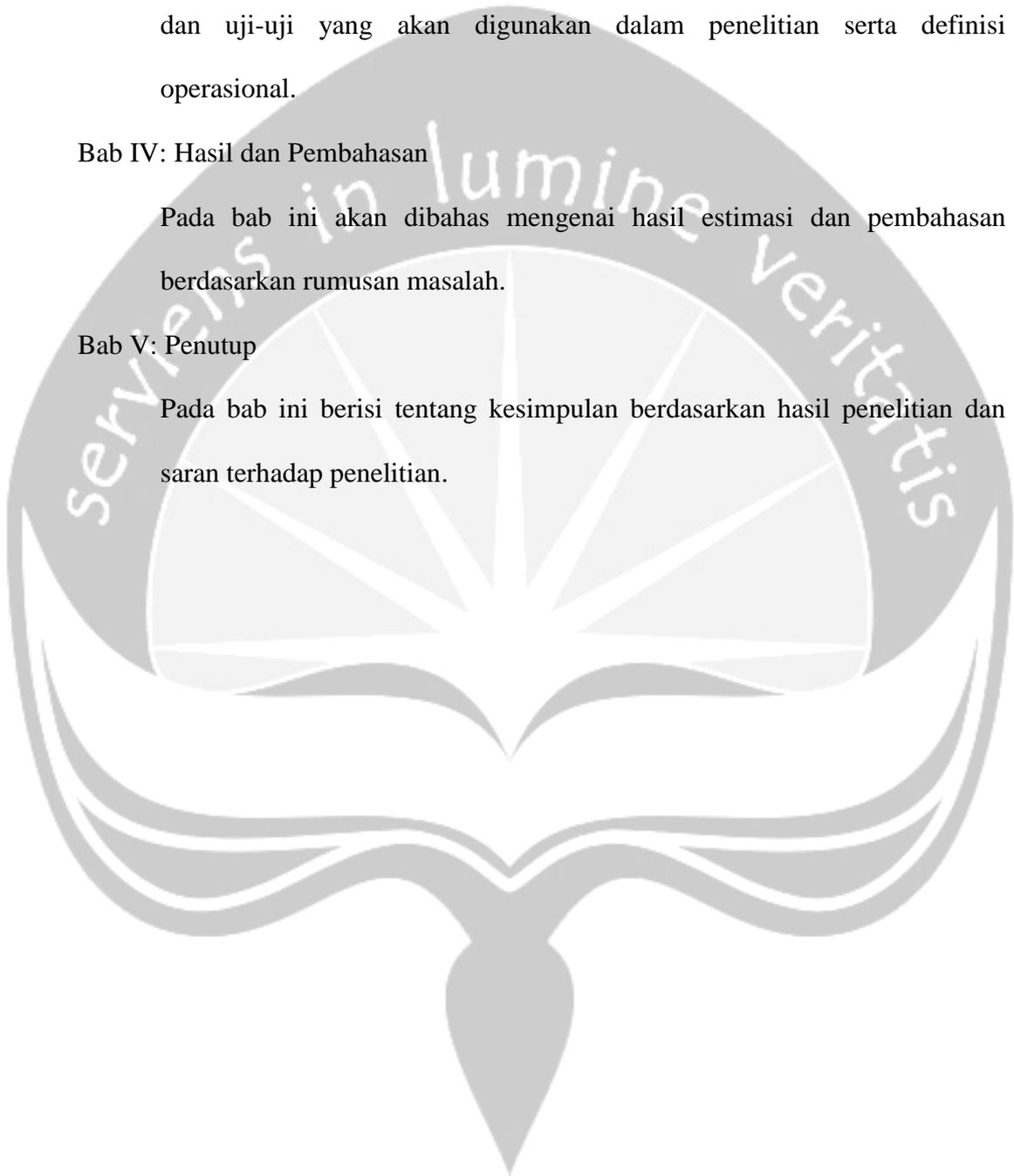
Pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, model penelitian, dan uji-uji yang akan digunakan dalam penelitian serta definisi operasional.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil estimasi dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah.

Bab V: Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran terhadap penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi

2.1.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi

Arsyad (1992: 14) menyatakan pembangunan ekonomi pada umumnya di definisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara atau wilayah meningkat dalam jangka panjang dan disertai dengan perbaikan pada sistem kelembagaan.

Pengertian lain pembangunan ekonomi merupakan kenaikan pada tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau wilayah, dimana perkembangannya ditentukan oleh kapasitas output produksi yang dihasilkan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang jauh lebih baik (Sukirno, 1985: 13).

2.2 Infrastruktur

2.2.1 Pengertian Infrastruktur

Setyaningrum (1997), dalam Wahyuni (2009: 19), menyatakan bahwa di suatu negara infrastruktur merupakan bagian dari *capital stock*, merupakan biaya tetap sosial yang secara langsung mendukung pada tingkat produksi. Stone (2000), dalam Kodoatie (2003: 8), menyatakan bahwa infrastruktur merupakan fasilitas yang dibutuhkan atau dikembangkan oleh pihak publik, yaitu pemerintah tujuannya untuk transportasi, penyediaan air, pembangunan limbah, tenaga listrik,

dan lain-lain yang berhubungan dengan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi dan sosial.

Bank Dunia menjelaskan pembangunan infrastruktur memiliki tiga jenis kategori, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan aktivitas ekonomi yang mempunyai dampak positif, meliputi utilitas publik (sanitasi, gas, telekomunikasi, tenaga, air), pekerjaan umum (irigasi, bendungan, jalan, dan kanal) dan sektor transportasi (pelabuhan, lapangan terbang, jalur kereta api, dan lain-lain).
2. Infrastruktur sosial, meliputi rekreasi, pendidikan, dan kesehatan.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi koordinasi, kontrol administrasi dan penegakan hukum.

Bulohlabna (2008), dalam Wahyuni (2009: 23), menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam penyediaan infrastruktur untuk menjaga investasi yang berkelanjutan masuk ke negara atau daerah untuk pembangunan infrastruktur yang jauh lebih baik, sehingga infrastruktur yang tersedia dapat di nikmati secara kualitas maupun kuantitas.

2.2.2 Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi yang di jelaskan adalah infrastruktur ekonomi berupa infrastruktur jalan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam satuan kilometer (km), salah satu infrastruktur daratan yang memiliki peran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tersedianya jalan dapat mengurangi modal yang dikeluarkan, proses distribusi dan produksi lebih efisien. Meningkatnya

pembangunan jalan memiliki dampak pada pertumbuhan di wilayah lain, yaitu volume lalu lintas menjadi meningkat. Sebaliknya apabila prasarana jalan rusak dan buruk alokasi sumber daya menjadi terhambat, pendistribusian faktor produksi, pembangunan industri, jasa dan barang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat pendapatan (Wahyuni, 2009: 24).

Ikhsan (2004), dalam Wahyuni (2009: 24), menjelaskan bahwa jalan raya berpengaruh terhadap biaya tetap dan biaya variabel. Apabila infrastruktur jalan dibangun oleh sektor swasta, maka biaya yang dikeluarkan meningkat secara signifikan dan berdampak pada *cost of entry*, secara potensial infrastruktur jalan memiliki keunggulan yang komparatif, karena keadaan yang kurang mendukung sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak efisien.

2.2.3 Infrastruktur Sosial

2.2.3.1 Infrastruktur Kesehatan

Peningkatan pada bidang kesehatan dan gizi di masyarakat sangat penting untuk kualitas hidup manusia, meningkatnya kesehatan dan gizi bagi manusia menimbulkan dampak yang baik, bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi untuk generasi berikutnya. Ketersediannya fasilitas kesehatan yang memadai dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, hal ini bisa terwujud apabila adanya dukungan penuh dari pemerintah maupun swasta.

Depkes (2014), dalam Wahyuni (2009: 28), pembangunan infrastruktur kesehatan memiliki tujuan dalam Rencana Strategi Pembangunan yaitu kegiatan atau program pembangunan kesehatan yang diberi pemerintah untuk jaminan

kesehatan masyarakat yang jauh lebih baik. Sesuai dengan visinya yaitu “Indonesia Sehat 2010”. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang mendukung, tujuan dari visi tersebut supaya masyarakat bisa memberikan proitas pada dirinya sendiri untuk pencegahan, pemulihan, rehabilitasi sejenak, penyembuhan, dan meningkatkan kesehatan.
2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan suatu pelayanan kesehatan dan mutu lembaga, serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan haknya baik kualitas dan kuantitas dalam medis, termasuk ketersediaan obat yang dibutuhkan dan harga yang terjangkau untuk masyarakat.
3. Pemerintah mengupayakan adanya infrastruktur kesehatan melalui rumah sakit, puskesmas, serta pelayanan kesehatan lainnya supaya kesehatan masyarakat bisa terpenuhi serta meningkatkan pembangunan kesehatan yang merata. Harapan pemerintah dengan adanya pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang jauh lebih baik karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.3.2 Infrastruktur Pendidikan

Peningkatan taraf pendidikan yang jauh lebih baik harapan bagi masyarakat agar memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, oleh karena itu pemerintah mengupayakan untuk membangun fasilitas infrastruktur pendidikan yang memadai berupa bangunan sekolah.

Harapan bagi pemerintah dengan adanya infrastruktur pendidikan yang tersedia bisa mengundang seseorang atau masyarakat untuk berinvestasi, pendidikan yang lebih tinggi membuat seseorang memiliki kemampuan lebih untuk memecahkan masalah yang terjadi. Kesimpulan yang diperoleh bahwa ketika seseorang atau masyarakat memperoleh pendidikan yang jauh lebih tinggi maka pendapatan yang diperoleh juga meningkat dan sebaliknya jika pendidikan yang diperoleh seseorang atau masyarakat rendah maka pendapatan yang diperoleh juga rendah. Kegunaan adanya infrastruktur pendidikan yang tersedia tingkat pengetahuan masyarakat semakin bertambah dan angka melek huruf semakin meningkat.

2.3 Produk Domestik Regional Bruto (BPRB)

Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat berdasarkan pendapatan regional yang diperoleh masyarakat. Pendapatan regional adalah besarnya pendapatan masyarakat di daerah. Ukuran tingkat pendapatan dilihat dari nilai total pendapatan maupun nilai rata-rata pendapatan daerah tersebut. Menganalisis tingkat *regional* atau tentang pembangunan regional tidak terlepas dari tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Ukuran parameter yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah salah satunya yaitu pendapatan masyarakat yang meningkat. Parameter lainnya seperti pemerataan pendapatan dan peningkatan lapangan kerja juga terkait dengan peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan daerah harus memiliki ikatan yang kuat terhadap meningkatnya pendapatan di masyarakat yaitu nilai rata-rata pendapatan

masyarakat (*income per capita*), maka alat ukur digunakan harus diketahui terlebih dahulu. Apabila alat ukur yang digunakan kurang benar maka data yang diperoleh bisa memberikan informasi yang salah (Tarigan, 2006: 13).

Sukirno (1985: 22), perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto dibagi menjadi dua cara yaitu dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rill atas dasar harga berlaku dan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan menurut kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dalam persen.

2.4 Ketimpangan Pendapatan

2.4.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Wilkinson and Pickett (2009), dalam Maipita (2014: 151), ketimpangan pendapatan merupakan indikator bagaimana sumber daya di distribusikan ke masyarakat. Tingginya tingkat ketimpangan memiliki dampak yang negatif, yaitu terdapat konflik dan kehidupan sosial menjadi buruk.

Kuznets menjelaskan bahwa nilai rata-rata pendapatan per kapita pada tahap awal pembangunan menurun, maka tingkat kesenjangan menuurun. Apabila nilai rata-rata pendapatan tinggi, maka tingkat kesenjangan tinggi. Apabila nilai rata-rata pendapatan masyarakat lebih tinggi dari sebelumnya, maka kesenjangan akan menurun. Interpretasi pada distribusi pendapatan yang diperoleh dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan menuju ekonomi perkotaan atau dari

ekonomi pertanian (tradisional) menuju ekonomi industri (modern). Kesimpulan dari kajian yang dilakukan oleh kuznets, yaitu:

1. Studi yang terkait sebagian besar mendukung hipotesa dari kuznets
2. Studi terkait dari kuznets dalam jangka panjang sebagian besar memiliki hubungan yang positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan, di negara maju sudah terbukti meningkatnya pendapatan yang tinggi.
3. Kesenjangan distribusi pendapatan kurva kuznets (sebelah kiri) cenderung tidak stabil.

McKay (2002), dalam Maipita (2014: 151), ketimpangan memang berbeda dengan kemiskinan, namun keduanya dapat saling terkait. Ketimpangan berfokus pada variasi standar hidup di antara individu dalam suatu populasi, sedangkan kemiskinan lebih berfokus pada sebagian anggota populasi, yaitu individu yang berada pada di bawah garis kemiskinan. Menurut McKay, ada beberapa alasan mengapa lembaga-lembaga pembangunan pemerintah harus peduli terhadap ketimpangan, antara lain:

1. Ketimpangan berhubungan langsung dengan kemiskinan. Pada tingkat tertentu dari rata-rata pendapatan, pendidikan, dan kepemilikan aset, ketimpangan hampir selalu menyiratkan kekurangan, baik absolut maupun relatif.
2. Ketimpangan berhubungan langsung dengan pertumbuhan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ketimpangan yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

3. Ketimpangan menjadi persoalan bagi individu itu sendiri. Ketimpangan akan menghambat seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
4. Ketimpangan sering menjadi faktor penting bahkan penentu dalam berbagai kejahatan, kekacauan sosial, dan berbagai konflik kekerasan.

2.4.2 Berbagai Ukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berbagai studi berusaha terus mengembangkan alat ukur dari ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan, secara umum ketimpangan pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu pengukuran normatif dan pengukuran objektif atau deskriptif.

Pendekatan normatif biasanya mengukur tingkat ketimpangan dari sudut pandang yang berdampak pada kesejahteraan sosial. Indikator yang digunakan bersifat normatif seperti etika, tingkat kepuasan, kesejahteraan, dan lainnya. Dengan kata lain, pendekatan normatif dapat menetapkan apakah ketimpangan baik atau buruk bagi individu, seberapa banyak kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh ketimpangan, serta bagaimana membandingkan dengan tingkat pendapatan antar individu. Oleh karena itu, pendekatan normatif memerlukan fungsi kesejahteraan sosial (*social walfer function*, SWF). Charles (2011), dalam Maipita (2014: 158), masalah utama dari penggunaan pendekatan normatif adalah kurang tersedianya alat untuk mengevaluasi ketimpangan dan dinamika dalam kelompok, karena dalam memaksimalkan utilitas tidak memperhitungkan distribusi dan transfer. Pendekatan deskriptif atau objektif biasanya menggunakan matematika.

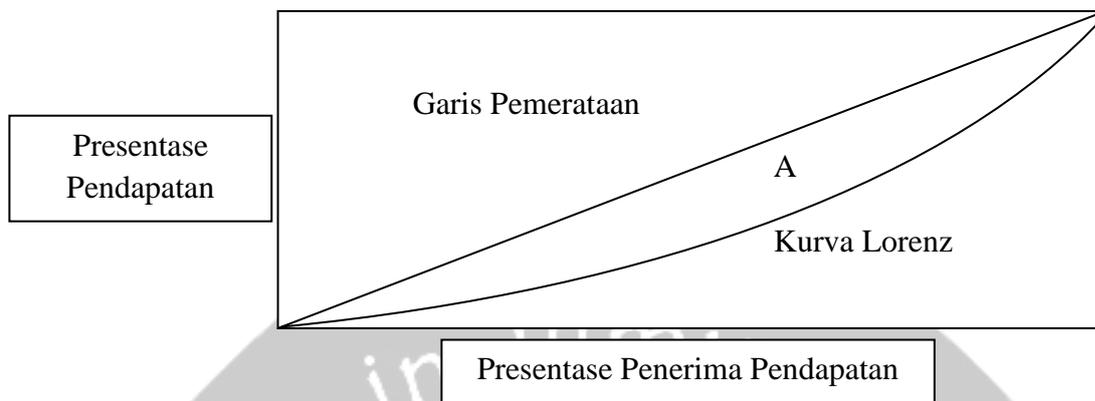
2.4.3 Distribusi Pendapatan Menurut Bank Dunia

Kesenjangan distribusi pendapatan bisa di ketahui yaitu dengan menggunakan kriteria Bank Dunia dan Indeks Gini. Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Bank Dunia dalam penilaian distribusi pendapatan yang diterima oleh penduduk sebesar 40% berpenghasilan rendah. Kategori pada kesenjangan distribusi pendapatan, yaitu:

1. Tinggi, apabila 40% penduduk berpenghasilan rendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan.
2. Sedang, apabila 40% penduduk berpenghasilan rendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan.
3. Rendah, apabila 40% penduduk berpenghasilan rendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.

2.4.4 Indeks Gini

Nilai Indeks Gini memiliki skala antara 0 dan 1. 0 menjelaskan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat terbagi secara merata (*perfect equality*), sedangkan 1 menjelaskan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat tidak terbagi secara merata (*perfect inequality*). Ketimpangan yang rendah mempunyai nilai Indeks Gini kurang dari 0.4. Apabila Indeks Gini di atas 0.4 maka tingkat ketimpangannya tinggi. Secara aktual Kurva Lorenz memiliki hubungan antara presentase pendapatan yang diterima dengan total pendapatan yang diterima. Jika jarak Kurva Lorenz semakin jauh dari garis pemerataan, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi.



Sumber: Todaro, 2009.

Gambar 2.1
Kurva Lorenz

Contoh kasus ketidakmerataan sempurna, apabila seluruh pendapatan nasional yang diterima hanya satu orang saja, sementara orang lain tidak sama sekali menerima pendapatan, maka Kurva Lorenz menjelaskannya pada garis yang berhimpitan dengan sumbu horizontal (bawah) serta sumbu vertikal (kanan). Sehingga tidak ada satu Negara pun yang memperlihatkan adanya ketidakmerataan sempurna atau pemerataan sempurna dalam distribusi pendapatan, garis diagonal pada Kurva Lorenz di setiap Negara berada di sebelah kanan. Gambar 2.1, menjelaskan apabila tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan di suatu Negara semakin tinggi, maka Kurva Lorenz semakin melengkung mendekati sumbu horizontal ke bawah (Todaro, 2009: 236-237).

2.4.5 Indeks Theil dan Indeks-L

Ukuran ketimpangan yang paling banyak digunakan karena memenuhi kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran ini termasuk kategori

“*generalized entrophy*”. Secara umum, rumus *generalized entrophy* ditulis sebagai berikut:

$$GE \ \alpha = \frac{1}{\alpha(\alpha-1)} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{y}^\alpha - 1 \quad 2.1$$

Keterangan: y merupakan rata-rata pendapatan (pengeluaran)

Kuncoro (2010: 89), nilai GE merupakan variasi antara 0 dan ∞ di mana 0 berarti distribusi pendapatan merata dan nilai tinggi berarti distribusi pendapatan tidak merata sehingga ketimpangan menjadi lebih tinggi. Ukuran parameter α yang digunakan dalam kelompok, GE merupakan perwakilan yang diberikan untuk menimbang jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan distribusi pendapatan di sekor bawah (penduduk miskin), dan nilai α lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan distribusi pendapatan di sekor atas (penduduk kaya). Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1. GE (1) disebut sebagai Indeks Theil, sementara GE (0) dikenal dengan Indeks-L yang sering disebut sebagai ukuran deviasi log rata-rata (*mean log deviation*) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari $\log(y)$, sebagai berikut:

$$GE \ 1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{y} \ln \frac{y_i}{y} \quad 2.2$$

$$GE \ 0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \frac{y}{y_i} \quad 2.3$$

Kuncoro (2010: 89), menjelaskan konsep entropi Theil tingkat distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan aplikasi dari konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan Indeks entropi menawarkan pandangan yang

tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi produk domestik bruto dunia.

Ying (2000), dalam Kuncoro (2010: 89), untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar Provinsi, indeks ketimpangan regional yang digunakan oleh Ying yaitu Theil. Indeks ketimpangan regional Theil dibagi menjadi dua yaitu, ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional. Rumus dari Indeks entropi Theil adalah sebagai berikut:

$$I(y) = (y_i/Y) \times \log\left[\frac{y_i}{x_j}\right] \quad 2.4$$

di mana:

I_y = Indeks Entropi Theil j^2

y_i = PDRB per kapita kecamatan² i

Y = Rata-rata PDRB per kapita kabupaten

x_j = Jumlah penduduk kecamatan j

X = Jumlah penduduk kabupaten

* keterangan ⁽²⁾ = Jika y_i dan x_j adalah kabupaten/kota, maka Y dan X adalah Provinsi, jika y_i dan x_j adalah Provinsi maka Y dan X adalah lingkup yang lebih luas lagi (Indonesia).

Selama kurun waktu tertentu teori indeks Theil membuat perbandingan. Indeks Theil secara rinci dapat menyediakan sub unit geografis dalam jumlah yang lebih kecil, penjelasannya di bagi menjadi dua yaitu, pertama selama periode tertentu konsentrasi geografis bisa dianalisis secara jelas, sedangkan kedua dapat mengkaji suatu gambar lebih rinci tentang ketimpangan spasial.

Diamon dan Thorbecke (1999), dalam Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2009 (BPS, 2012: 6), berpendapat bahwa untuk menurunkan tingkat ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) tidak selalu konsisten karena insiden kemiskinan terus bertambah kecuali jika terdapat dua aspek yang menjadi landasan adanya inkonsistensi, yaitu:

1. Variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis akibat kritis.
2. Inkonsistensi lebih merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

2.5 Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Bajar, Sumedha; Rajeev, Meenakshi (2015) adalah *The Impact Of Infrastructure Provisioning On Inequality: Evidence From India*. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui seberapa besar dampak yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam pembangunan infrastruktur di India, adanya pembangunan infrastruktur yang memadai harapan pemerintah perekonomian pemerintah di India meningkat, serta tingkat kesejahteraan masyarakat India merata. Metode yang digunakan dalam menganalisis yaitu regresi panel, karena metode yang digunakan memiliki keunggulan dalam pengolahan data yaitu: pertama, data panel merupakan penggabungan dari *time series* dan *cross section* serta mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, penggabungan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi

masalah yang timbul apabila masalah penghilang variabel (*omitted-variabel*). Hasil analisis yang diuji menunjukkan bahwa pengaruh pembangunan infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di India, maka variabel tersebut memiliki keunggulan yang signifikan.

Sukmawati (2016), dana merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyediakan sarana infrastruktur. Pemerintah dihadapkan oleh berbagai pilihan salah satunya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat kemiskinan. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh penyediaan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, jenis infrastruktur yang dianalisis memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan menggunakan data panel yaitu 33 provinsi tahun 2005-2013. Variabel yang digunakan yaitu jalan, PDRB, kemiskinan, pelabuhan, air, listrik, PNS, kesehatan, pendidikan, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, indeks gini, dan dummy kawasan. Hasil yang diperoleh yaitu 1) pelabuhan, air, listrik, PNS, kesehatan, pendidikan, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin dan dummy kawasan berpengaruh positif dan signifikan. 2) jalan berpengaruh positif. 3) listrik tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 4) PNS berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 5) pertumbuhan ekonomi negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 6) indeks gini tidak berpengaruh.

Rahayuningtias (2014) kemiskinan di Indonesia tahun 2008-2011 cenderung mengalami penurunan dalam ketersediaan infrastruktur untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Metode yang digunakan panel yaitu 155

kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008-2011. Tujuan untuk menganalisis kondisi dan keterkaitan ketersediaan infrastruktur dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Variabel yang digunakan berupa listrik, air bersih, ranjang rumah sakit, sekolah, jalan dan listrik. Variabel kontrol yang digunakan yaitu PDRB perkapita, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hasil yang diperoleh 1) secara umum ketersediaan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan kecuali sekolah. 2) tingkat kemiskinan berpengaruh negatif kecuali air. Variabel yang digunakan dari kelima tersebut yang paling mempengaruhi efektifitas penduduk miskin yaitu variabel listrik.

Manupada (2014), salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan perekonomian di suatu negara yaitu pendapatan per kapita. Meskipun di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, belum tentu tingkat pemerataan di setiap provinsi merata. Salah satu perbedaan pendapatan disebabkan oleh belum meratanya kuantitas dan kualitas infrastruktur. Metode yang digunakan data panel yaitu 30 provinsi di Indonesia tahun 2003-2012, 15 provinsi memiliki PDRB per kapita tertinggi dan 15 provinsi memiliki PDRB perkapita terendah. Variabel yang digunakan dependen yaitu pendapatan per kapita (*LNPDRBK*). Variabel independen yaitu infrastruktur listrik (*LSTRK*), panjang jalan (*LNJLN*), air (*AIR*), ranjang rumah sakit (*LNBED*) dan sekolah (*LNSKLH*). Hasil yang diperoleh 1) secara keseluruhan di Indonesia variabel infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita kecuali air untuk PDRB per kapita tinggi, serta panjang jalan untuk PDRB per kapita di provinsi rendah. 2) pendapatan per kapita di Indonesia secara

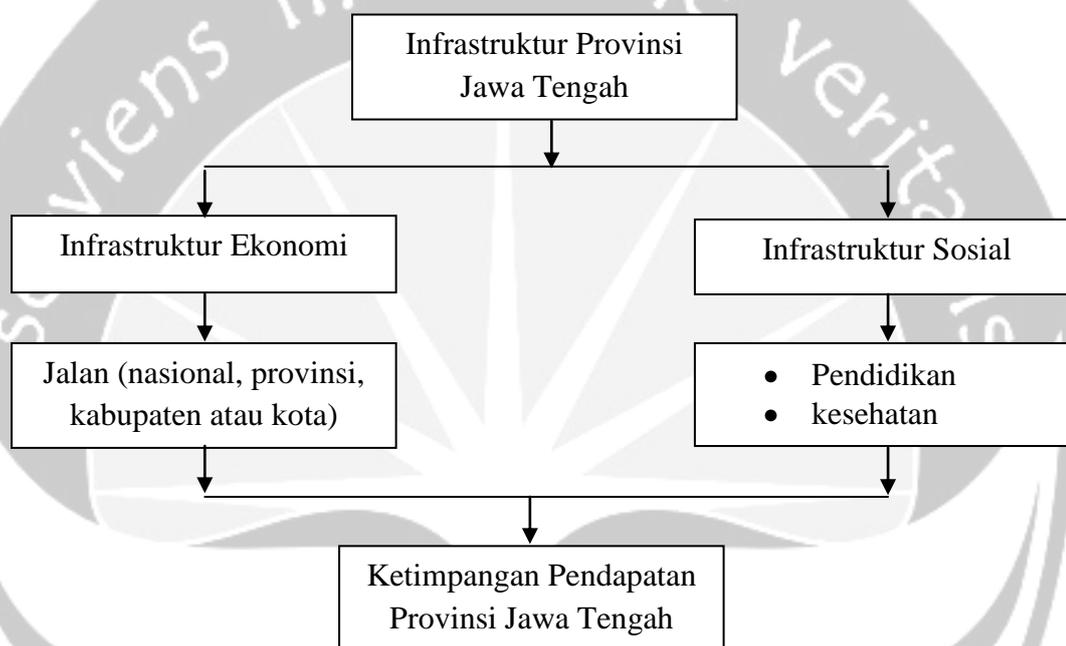
keseluruhan dan provinsi dengan pendapatan per kapita tinggi sensitif terhadap ketersediaan infrastruktur ekonomi, untuk PDRB per kapita dengan pendapatan per kapita di provinsi masih rendah terhadap ketersediaan infrastruktur sosial.

Tampubolon (2013), melakukan studi mengenai Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan Per Kapita: Analisis Provinsi Di Indonesia 2007-2011. Metode yang digunakan yaitu panel. Hasil analisis yang dilakukan: 1) jumlah rasio sekolah dan air berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sehingga ketimpangan distribusi pendapatan menurun. 2) panjang jalan, rumah sakit dan listrik memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga tingkat ketimpangan di setiap provinsi naik. Serta lima variabel bebas yang digunakan, tiga diantaranya berpengaruh positif dalam meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan.

2.6 Kerangka Pemikiran Konseptual

Penelitian ini berusaha untuk membuktikan adanya hubungan pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2015. Gambar 2.2 Wahyuni, (2009: 48), menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Jawa Tengah terdapat masalah berupa ketimpangan pendapatan. Sumber daya yang ada masih belum mencukupi ke seluruh lapisan masyarakat sehingga masuk kategori miskin dan kaya. Ketimpangan pendapatan ini bila dibiarkan terus menerus bisa melebar lebih luas sehingga peningkatan

kegiatan perekonomian tidak dapat mencukupi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan pendapatan juga menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang tinggi. Hal ini disebabkan pada kemampuan masing-masing daerah untuk tumbuh, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang ada di wilayah tersebut.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Analisis yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yaitu perkembangan yang ditentukan oleh kapasitas output produksi yang dihasilkan, sementara itu kapasitas output produksi sangat ditentukan oleh akumulasi modal atau investasi yang dilakukan, produktivitas tenaga kerja, serta penggunaan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk pemanfaatan investasi publik yang baik yaitu adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, baik infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur yang beragam, baik kualitas maupun kualitasnya disetiap wilayah di

Jawa Tengah membawa pengaruh terhadap produktivitas ekonomi di masing-masing wilayah yang digunakan untuk ketimpangan yang terjadi. Analisis yang dilakukan terhadap pembangunan ekonomi serta melihat besarnya pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Infrastruktur yang diteliti terdiri dari infrastruktur ekonomi berupa jalan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota) dan infrastruktur sosial berupa fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling) dan pendidikan (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA).

Produktivitas infrastruktur dapat dilihat pada tingkat elastisitas ketersediaan infrastruktur terhadap perekonomian. Semakin besar nilai elastisitas pada infrastruktur menunjukkan bahwa infrastruktur tersebut memiliki tingkat produktivitas pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga. Semakin besar elastisitas yang digunakan pada layanan infrastruktur yang tersedia secara optimal maka akan memberikan *rate of return* semakin tinggi. Namun sebaliknya jika layanan infrastruktur yang digunakan buruk dilihat dari kualitas dan kuantitasnya, maka pertumbuhan ekonomi berdampak buruk.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Jumlah data dalam penelitian ini menggunakan *cross section* sebanyak 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah, serta *time series* sebanyak 15 tahun dari tahun 2001-2015 sehingga jumlah observasi yang didapatkan sebanyak 525. Variabel yang digunakan yaitu gini ratio, panjang jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota), banyaknya jumlah fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling), banyaknya jumlah fasilitas sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA), dan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di setiap masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dan memodifikasi dari penelitian sebelumnya Bajar, Sumedha dan Rajeev, Meenakshi (2015). Model yang digunakan yaitu:

$$\ln G = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 I + \varepsilon_{it} \quad (3.1)$$

Perbedaan dari penelitian sebelumnya G merupakan perwakilan dari indeks gini. X merupakan bagian dari matriks dasar dari penelitian sebelumnya

oleh Calderon dan Serven (2004), Chong (2004) dan lainnya. I merupakan variabel infrastruktur. Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan koefisien gini, data infrastruktur berupa jalan (nasional, provinsi, kota maupun kabupaten), banyaknya jumlah fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling), jumlah fasilitas sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA), selain itu data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam satuan persen. Persamaan model yang digunakan dengan data panel yaitu:

$$G_{it} = \beta_0 + \beta_1 J_{L_{it}} + \beta_2 KES_{it} + \beta_3 PEND_{it} + \beta_4 PE_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.2)$$

di mana:

G = Indeks gini (*Gini Ratio*) per kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dalam skala 0 dan 1.

Jalan = Panjang jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota) per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (km).

KES = Banyaknya jumlah fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling) per kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

PEND = Banyaknya jumlah fasilitas sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA) per kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

PE = Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah (persen).

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi.

- ε_{it} = Variabel pengganggu (*error term*).
i = Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
t = Tahun.

3.3 Alat Analisis

Alat analisis dalam metode ini menggunakan regresi panel. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan data panel ada dua yaitu:

1. Data yang digunakan merupakan gabungan dua data yaitu *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar.
2. Menggabungkan informasi dari data serta dapat mengatasi masalah yang timbul yaitu penghilang variabel (*omitted-variabel*).

Estimasi yang digunakan dalam metode regresi data panel, dalam pendekatannya menggunakan tiga model yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effects* (Widarjono, 2013: 353-359).

3.3.1 Uji *Common Effect*

Penggabungan model yang paling sederhana yaitu dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*. Penggabungan data tersebut, dapat menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Hasil analisis regresi dianggap berlaku apabila semua objek pada semua waktu serta menggabungkan data dengan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model (Winarno, 2009: 9.11).

3.3.2 Uji *Fixed Effect* (Uji Chow)

Uji ini digunakan untuk melihat hasil dari regresi yang paling tepat digunakan antara *Common effect* dan *Fixed Effect* yang biasa disebut dengan *Chow Tes*. Keputusan hipotesis *Chow Tes* adalah sebagai berikut:

H_0 = model *Common effect*.

H_a = model *Fixed Effect*.

Dasar penolakan terhadap H_0 adalah dengan menggunakan uji F-statistik:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{(RSS_1 - RSS_2) / (n-1)}{RSS_2 / (nt - n - k)} \quad (3.3)$$

di mana:

RSS_1 = *Residual sum of square* teknik CEM.

RSS_2 = *Residual sum of square* teknik FEM.

n = Jumlah unit *cross section*.

t = Jumlah unit *time series*.

k = Jumlah variabel independen.

Keputusan yang diambil untuk menerima atau menolak H_0 sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas *Chi-square* > alpha, maka H_0 diterima dan model yang digunakan *common effect*.
2. Jika nilai probabilitas *Chi-square* < alpha, maka H_0 ditolak dan model yang digunakan *fixed effect*.

3.3.3 Uji *Random Effects* (Uji Hausman)

Random Effect merupakan dasar pertimbangan dalam memilih salah satu model yang terbaik antara *Fixed Effect* dengan *Random Effect*.

Langkah-langkah untuk menentukan Uji Hausman ini, sebagai berikut:

1. Meregreskan masing-masing dari model *fixed effect* dan *random effect*
2. Menyusun (H_0) hipotesis nol dan (H_a) hipotesis alternatif, sebagai berikut:

H_0 : model *random effect*.

H_a : model *fixed effect*.

3. Menentukan batas kritis untuk keperluan menolak atau tidaknya suatu hipotesis.
4. Keputusan untuk menolak atau menerima H_0 sebagai berikut:
 - a. Jika nilai probabilitas *Cross Section Random* < alpha, maka H_0 ditolak dan model yang digunakan *fixed effect*.
 - b. Jika nilai probabilitas *Cross Section Random* > alpha, maka H_0 diterima dan model yang digunakan *random effect*.

3.4 Uji Statistik

Uji statistik digunakan untuk menganalisis hasil dari model panel yang tepat. Langkahnya dengan menggunakan uji statistik. Uji statistik dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari koefisien regresi independen terhadap dependen. Uji ini meliputi:

3.4.1 Uji t

Uji t digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel dalam mempengaruhi variabel tidak bebas pada

tingkat signifikansi tertentu. Metode yang digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan sebagai berikut:

1. Membuat hipotesis dengan menggunakan uji satu sisi:
 - $H_0: \beta_1 \geq 0$.
 - $H_a: \beta_1 < 0$.
2. Keputusan untuk menolak atau tidaknya hipotesis nol H_0 , sebagai berikut:
 - Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$: H_0 ditolak. Artinya variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen.
 - Jika $t_{hitung} > -t_{tabel}$: H_0 tidak ditolak. Artinya, variabel independen secara individu tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.4.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengevaluasi ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance = ANOVA*). Untuk menguji apakah koefisien regresi $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ dan β_4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan alpha sebesar 5%. Metode yang digunakan untuk prosedur uji F dijelaskan sebagai berikut (Widarjono, 2013: 65):

1. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) sebagai berikut:
 - $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$.
 - $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$.

2. Menentukan batas kritis untuk keputusan menolak atau tidaknya suatu hipotesis H_0 , dengan nilai F-tabel = $F_{\alpha;df1;df2}$. Nilai kritis dilihat berdasarkan besarnya tingkat alpha sebesar 5% dan df1 dimana ditentukan oleh numerator (k-1) dan df2 untuk denominator (n-k). Nilai k (konstanta) merupakan banyaknya parameter model yang ditentukan serta variabel dependen.
3. Keputusan untuk menolak atau tidaknya hipotesis nol H_0 , sebagai berikut:
 - Jika nilai F-statistik > F-tabel, maka H_0 ditolak.
 - Jika nilai F-statistik < F-tabel, maka H_0 tidak ditolak.

3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menjelaskan tentang seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien determinasi dapat dihitung, sebagai berikut (Widarjono, 2013: 24):

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{TSS-SSR}{TSS} = 1 - \frac{SSR}{TSS} \quad (3.4)$$

$$R^2 = 1 - \frac{e_i^2}{y_i^2} = 1 - \frac{e_i^2}{(y_i - \bar{y})^2} \quad (3.5)$$

di mana:

R^2 = Koefisien determinan.

ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan (*Explained Sum of Squers*).

TSS = Jumlah kuadrat total (*Total Sum of Squers*).

RSS = Jumlah kuadrat residual (*Residual Sum of Square*).

e_i^2 = Nilai taksiran atas residual.

Berdasarkan besarnya nilai dari koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai R^2 terletak antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Apabila R^2 semakin mendekati nilai satu maka semakin besar variabel terkait yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lainnya yang digunakan.

3.5 Uji Heteroskedastisitas

Heterosdastisitas memiliki tiga asumsi tentang variabel gangguan, salah satu gangguan yang harus dipenuhi yaitu variabel gangguan yang memiliki variasi sama (homokedastiditas). Jika asumsi yang dilakukan tidak dapat memenuhi syarat maka asumsi yang dilakukan terdapat gangguan (heterosdastisitas). Heterosdastisitas merupakan variabel gangguan apabila kondisi pada model tersebut memiliki varian yang berbeda. Konsekuensi adanya heterokedastisitas yaitu varian pada model menjadi tidak minimum (Widarjono, 2013: 113). Kriteria pengujian pada heteroskedastisitas yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode *White*, sebagai berikut:

3.5.1 Metode White (*The Method of Ordinary Last Squares*)

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat bahwa faktor-faktor pengganggu untuk semua pengamatan memiliki variasi yang sama. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka terdapat heteroskedastisitas (Gunjarati dan Porter, 2009: 387-388). Untuk pengujian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dari suatu model yang dilakukan maka dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode *white*. Alpha 5%, kriteria yang dilakukan untuk mengestimasi metode yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas $\text{Obs} \cdot R\text{-square} > \alpha$, maka tidak terdapat penyakit pada heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai probabilitas $\text{Obs} \cdot R\text{-square} < \alpha$, maka terdapat penyakit pada heteroskedastisitas.

3.6 Uji Multikolinieritas

Hubungan linier antar variabel independen di dalam regresi berganda disebut uji multikolinieritas (*multicollonearity*). Hubungan antar variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan yang sempurna (*perfect*) dan hubungan linier yang kurang sempurna (*imperfect*). Persamaan dalam mendapatkan estimator yang tidak *bias*, linier, dan mempunyai varian yang minimum (BLUE). Estimator yang BLUE tidak memerlukan asumsi terbebas dari masalah multikolinieritas. Estimasi BLUE hanya berhubungan dengan asumsi tentang variabel gangguan. Ada dua asumsi penting tentang variabel gangguan yang akan mempengaruhi sifat dari estimator yang BLUE. Pertama, varian dari variabel gangguan adalah tetap atau konstan (homoskedastisitas). Kedua, tidak ada korelasi atau hubungan antara variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan observasi yang lain atau sering disebut tidak ada masalah autokorelasi (Gujarati dan Porter, 2009: 371).

Konsekuensi jika model yang digunakan mengandung multikolinieritas, karena varian yang dilakukan terus naik atau membesar maka *standard error* β_1 dan β_2 juga naik atau membesar. Oleh karena itu, dampak adanya multikolinieritas di dalam model regresi jika menggunakan teknik estimasi

dengan metode kuadrat kecil (OLS) tetapi masih mempertahankan asumsi lain adalah sebagai berikut:

1. Estimator masih bersifat BLUE dengan adanya multikolinieritas namun estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat.
2. Interval estimasi akan cenderung lebih besar dan nilai hitung statistik uji t akan kecil sehingga membuat variabel independen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
3. Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen melalui uji statistik t, namun nilai koefisien determinasi R^2 masih bisa relatif tinggi.

Model yang mempunyai *standard error* besar dan nilai statistik t yang rendah, dengan demikian merupakan indikasi awal adanya masalah Multikolinieritas dalam model. Namun, multikolinieritas dapat terjadi jika model yang kita punyai merupakan model yang kurang bagus, cara mengetahuinya yaitu apabila koefisien determinasi yang tinggi (R^2) di atas 0.8 tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji t^2 . Namun berdasarkan uji F secara statistik signifikan berarti semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Widarjono, 2013: 103).

3.7 Batasan Operasional

Batasan operasional yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dengan data yang melihat dari Indeks Gini dalam skala 0 dan 1.
2. Penelitian yang diamati berupa infrastruktur ekonomi yaitu jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota) di Provinsi Jawa Tengah dalam km.
3. Penelitian yang diamati berupa infrastruktur kesehatan yaitu jumlah kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling) di Provinsi Jawa Tengah.
4. Penelitian yang diamati berupa infrastruktur pendidikan yaitu jumlah sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA) di Provinsi Jawa Tengah.
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan adalah Laju Produk Domestik Regional Bruto dalam persen atas harga dasar konstan 2000, dengan pengamatan tahun 2001-2015.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2015. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan antara data *time series* dan *cross section*, sehingga regresi yang didapatkan yaitu menggunakan data panel. Sampel yang digunakan sebanyak 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah.

4.1 Hasil

4.1.1 Uji Signifikansi Model

Penelitian ini membentuk tiga model, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effects*. Pemilihan model yang digunakan haruslah tepat agar pengujian yang dilakukan tidak bersifat bias. Signifikansi model yang dilakukan ada dua tahap yaitu: pertama, *Chow Test* digunakan untuk memilih dengan menggunakan pengujian antara *Common effect* dan *Fixed Effect*. Kedua dengan menggunakan *Hausman Test*, digunakan untuk memilih dengan menggunakan pengujian antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

4.1.2 Uji signifikansi *Fixed Effect*

Uji ini digunakan untuk memilih hasil dari regresi yang paling tepat digunakan antara *Common effect* dan *Fixed Effect* yang biasa disebut dengan *Chow Tes*. Keputusan hipotesis *Chow Tes* sebagai berikut:

H_0 = model *Common effect*

H_a = model *Fixed Effect*

Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol H_0 dengan tingkat signifikansi alpha sebesar 0.05 ($\alpha = 5\%$), sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas *Chi-square* $>$ alpha, maka H_0 diterima dan model yang digunakan *common effect*.
2. Jika probabilitas *Chi-square* $<$ alpha, maka H_0 ditolak dan model yang digunakan *fixed effect*.

➤ Berikut hasil estimasi uji chow:

Tabel 4.1
Hasil Estimasi Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.960432	(34,486)	0.0000

Sumber: Hasil data November 2017 (diolah).

Berdasarkan hasil regresi uji chow maka diperoleh nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0.0000. Tingkat signifikansi alpha 5%, maka dapat disimpulkan probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0.0000 lebih kecil daripada alpha sebesar 0.05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hal tersebut model yang paling baik untuk digunakan yaitu *Fixed Effect*.

Setelah mengetahui kriteria, selanjutnya mencari nilai F-hitung yang akan diuji, F-hitung yang didapatkan sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/(n-1)}{RSS_2/(nt-n-k)} \quad (4.1)$$

$$F_{hitung} = \frac{(1.370588 - 0.970296)/(35-1)}{0.970296/(525-35-4)} \quad (4.2)$$

$$F_{hitung} = \frac{(0.400292)/(34)}{0.970296/(486)} \quad (4.3)$$

$$F_{hitung} = \frac{0.0019964938}{0.0019905062} \quad (4.4)$$

$$F_{hitung} = 1.0030080927 \quad (4.5)$$

Batas yang digunakan untuk menolak atau tidak menolak H_0 tingkat signifikansi alpha sebesar 5%, jumlah yang dilakukan untuk observasi (n) sebanyak 525, banyaknya variabel dependen dan independen sebanyak (k) 4. Alpha sebesar 0.05 ($\alpha = 5\%$); $df1 = k-1$; $df2 = n-k$. Kriterianya sebagai berikut:

$$F_{tabel} = F_{\alpha; df1; df2} = F_{0.05; 3; 521} = 2.60.$$

4.1.3 Uji Signifikansi *Random Effect*

Berikut hasil estimasi uji hausman dengan menggunakan *eviews*:

Tabel 4.2
Hasil Estimasi Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.328361	4	0.0004

Sumber: Hasil data November 2017 (diolah).

Bedasarkan hasil dari estimasi uji hausman, nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar 0.0004. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Maka dapat di simpulkan nilai probabilitas *Cross-section random*

sebesar 0.0004 lebih kecil dari alpha 0.05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut model yang baik untuk digunakan adalah model *fixed effect*.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya uji ini untuk memilih model antara model *Fixed Effect* atau model *Common Effect*, maka hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 : model yang digunakan *common effect*.

H_a : model yang digunakan *fixed effect*.

Keputusan untuk menolak atau tidaknya suatu hipotesis sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas *Chi-square* $>$ alpha, maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah *common effect*.
- b. Jika nilai probabilitas *Chi-square* $<$ alpha, maka H_0 ditolak dan model yang digunakan adalah *fixed effect*.

4.1.4 Uji t

Hasil pengujian uji-t, dengan menggunakan tingkat signifikansi alpha 5% dengan jumlah pengamatan (n) sebanyak 525, dan banyaknya parameter (k) sebanyak 4, maka batas kritis untuk uji t sebagai berikut: $t\text{-tabel} = t_{\alpha;df} = t_{0.05;521} = 1.6$. Nilai df diperoleh dari $n-k$ yaitu $(525-4 = 521)$. Berikut masing-masing uji t:

1. Infrastruktur Jalan

Hasil dari penelitian yang diperoleh dengan menggunakan model *Fixed Effect* dapat dijelaskan bahwa infrastruktur panjang jalan di Jawa Tengah memiliki nilai t-tabel sebesar 3.435993, dengan tingkat signifikansi 5%

maka H_0 tidak ditolak. Hal ini ditunjukkan bahwa kriteria yang dilakukan oleh variabel infrastruktur jalan tidak dipengaruhi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga dapat dilihat pada nilai probabilitas sebesar 0.0006 lebih kecil dari alpha sebesar 0.05 ($\alpha = 5\%$).

2. Infrastruktur Kesehatan

Hasil estimasi dari penelitian yang diperoleh dengan menggunakan model *Fixed Effect* dapat dijelaskan bahwa infrastruktur kesehatan di Jawa Tengah memiliki nilai t-tabel sebesar -1.916567, dengan tingkat signifikansi 5%, maka H_0 ditolak. Artinya kriteria yang dilakukan oleh variabel infrastruktur kesehatan mempengaruhi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga dapat dilihat pada nilai probabilitas sebesar 0.0559 lebih besar dari alpha sebesar 0.05 ($\alpha = 5\%$).

3. Infrastruktur Pendidikan

Hasil estimasi dari penelitian yang diperoleh dengan menggunakan model *Fixed Effect* dapat dijelaskan bahwa infrastruktur pendidikan di Jawa Tengah memiliki nilai t-tabel sebesar 0.998577 dengan tingkat signifikansi 5%, maka persamaan H_0 tidak ditolak. Hal ini ditunjukkan bahwa kriteria yang dilakukan oleh variabel infrastruktur pendidikan tidak dipengaruhi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga dapat dilihat pada nilai probabilitas sebesar 0.3185 lebih besar dari alpha sebesar 0.05 ($\alpha = 5\%$).

4. PDRB

Hasil dari penelitian yang diperoleh dengan menggunakan model *Fixed Effect* dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah memiliki nilai t-tabel sebesar 12.67080, dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Maka persamaan H_0 tidak ditolak. Hal ini ditunjukkan bahwa kriteria yang dilakukan oleh variabel PDRB tidak dipengaruhi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga dapat dilihat pada nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha sebesar 0.05 ($\alpha = 5\%$).

4.1.5 Uji F

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi alpha sebesar 5% dan nilai df *numerator* (N1) $k-1 = 4-1 = 3$, dan df *denominator* (N2) $n-k = 525-4 = 521$, sehingga diperoleh F-tabel sebesar 2.60. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.3 diperoleh nilai F-statistik sebesar 10.35273 lebih besar dari F-tabel, maka H_0 ditolak. Artinya secara bersama-sama atau serentak variabel independen (Jalan, Pendidikan, Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan.

4.1.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menjelaskan tentang seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen (Widarjono, 2013: 24). Hasil estimasi regresi model *Fixed Effect* tersebut dapat diartikan, koefisien determinasi sebesar 0.447353 atau sebesar 44%, artinya bahwa variasi

variabel dependen (*Gini Ratio*) dapat dijelaskan variasi variabel independen dalam penelitian (JL, KES, PEND, PE) dan sisanya sebesar 56% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.1.7 Metode White (*The Method of Ordinary Last Squares*)

Pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, jika asumsi yang dilakukan tidak terpenuhi maka terdapat heteroskedastisitas, kriterianya sebagai berikut:

- Nilai probabilitas Obs sebesar 525 * R-square sebesar 0.447353 = 234.86 > alpha 5% ($\alpha = 0.05$) sebesar 7.81, maka tidak terdapat penyimpangan asumsi klasik berupa heteroskedastisitas.

4.1.8 Uji Multikolinieritas

Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji multikolinieritas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas

	R	JL	KES	PEND	PE
R	1.000000	0.024039	-0.080586	-0.009153	0.397364
JL	0.024039	1.000000	0.266312	0.708151	-0.008958
KES	-0.080586	0.266312	1.000000	0.249387	-0.058769
PEND	-0.009153	0.708151	0.249387	1.000000	-0.016827
PE	0.397364	-0.008958	-0.058769	-0.016827	1.000000

Sumber: Hasil data November 2017 (diolah).

Masing-masing korelasi antar variabel menunjukkan bahwa nilai hasil dari regresi < 0.85 sehingga di simpulkan bahwa dalam analisis ini tidak ada multikolinieritas.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan panel dengan menggunakan hasil observasi sebanyak 525, maka model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Fixed Effect*. Adapun persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Ringkasan Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.242849	0.118993	-2.040870	0.0418
JL	5.46E-06	1.59E-06	3.435993	0.0006
KES	-3.42E-05	1.79E-05	-1.916567	0.0559
PEND	1.15E-05	1.16E-05	0.998577	0.3185
PE	0.020952	0.001654	12.67080	0.0000
R-squared	0.447353			
Sum squared resid	0.967257			
F-statistic	10.35273			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil data November 2017 (diolah).

$$G_{it} = \beta_0 + \beta_1 JL_{it} + \beta_2 KES_{it} + \beta_3 PEND_{it} + \beta_4 PE_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4.6)$$

➤ Hasil persamaan regresi dari model *Fixed Effect* sebagai berikut:

$$G_{it} = -0.242849 \beta_0 + 5.46E - 06 JL_{it} - 3.42E - 05 KES_{it} + 1.15E - 05 PEND_{it} + 0.020952 PE_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4.7)$$

di mana:

G = Indeks gini (*Gini Ratio*) per kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dalam skala 0 dan 1.

Jalan = Panjang jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota) per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (km).

- KES = Banyaknya jumlah fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling) per kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
- PEND = Banyaknya jumlah fasilitas sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA) per kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
- PE = Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah (persen).
- $\beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4$ = Koefisien regresi.
- ε_{it} = Variabel pengganggu (*error term*).
- i = Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
- t = Tahun.

Setelah didapatkan hasil dari persamaan tersebut, maka dapat diinterpretasikan. Tabel 4.4, menjelaskan nilai koefisien infrastruktur jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota) sebesar $5.46E-06$. Hal ini menunjukkan tingkat signifikansi alpha sebesar 5% dan nilai probabilitasnya sebesar $0,0006 H_0$ tidak ditolak. Nilai probabilitas sebesar $0,0006$ lebih kecil dari alpha sebesar 5% ($\alpha = 0.05$). Artinya bahwa variabel independen jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota) Provinsi Jawa Tengah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah. Jika jalan naik sebesar 1 km maka akan menimbulkan kenaikan Indeks Gini naik sebesar $0,00000546\%$, *ceteris paribus*. Penelitian ini tidak sejalan dengan studi Tampubolon (2013).

Hasil temuan ini tentu tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa infrastruktur jalan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Secara teoritis, seharusnya jika infrastruktur jalan meningkat baik dari aspek kuantitas dan kualitas maka dapat mendorong meningkatnya roda perekonomian khususnya transportasi barang dan jasa. Dengan meningkatnya roda atau kegiatan perekonomian di suatu wilayah maka akses masyarakat untuk memperoleh pendapatan juga meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan tersebut maka seharusnya ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut juga berkurang, *ceteris paribus*.

Jika ternyata hasil estimasi studi ini menunjukkan kondisi yang sebaliknya atau tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan maka kemungkinan disebabkan karena tidak terjadinya proses seperti yang diharapkan. Sebagai contoh, jalan yang telah dibangun ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak mempunyai alat transportasi untuk mengangkut hasil produksi atau hasil panennya ke pasar meskipun jalan yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dugaan lain penyebab meningkatnya infrastruktur jalan justru meningkatkan ketimpangan pendapatan adalah pembangunan infrastruktur jalan belum menjangkau daerah atau wilayah pelosok di kantong-kantong kemiskinan. Pembangunan jalan baru mencapai pusat-pusat kota kecamatan dan desa, belum mencapai wilayah pelosok misalnya dusun.

Nilai koefisien infrastruktur Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling) sebesar $-3.42E-05$. Hal ini

menunjukkan tingkat alpha sebesar 5% dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0559 maka dalam hal ini H_0 ditolak. Nilai probabilitas sebesar 0,0559 lebih besar dari alpha 5% ($\alpha = 0.05$). Artinya, bahwa variabel infrastruktur kesehatan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jika infrastruktur kesehatan naik 1 unit maka ketimpangan pendapatan antar wilayah yang diukur Indeks Gini turun sebesar 0.0000342%, *ceteris paribus*. Penelitian ini sejalan dengan studi Tampubolon (2013) .

Variabel infrastruktur kesehatan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Alasannya, infrastruktur kesehatan merupakan sarana sosial yang merupakan salah satu modal manusia (*human capital*) yang sangat diperlukan untuk menunjang perekonomian. Pemerintah membangun sarana infrastruktur kesehatan yang memadai guna meningkatkan kualitas masyarakat baik dari gizi hingga kesehatan. Kesehatan yang baik dapat menunjang bertambahnya partisipasi tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja masyarakat juga akan meningkat, pendapatan masyarakat yang diterima meningkat, tingkat ketimpangan turun dan tingkat kemiskinan menurun, *ceteris paribus*.

Nilai koefisien infrastruktur Pendidikan (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA) sebesar 1.15E-05. Hal ini menunjukkan tingkat alpha sebesar 5% dan nilai probabilitas sebesar 0.3185 maka dalam hal ini H_0 tidak ditolak. Nilai probabilitas sebesar 0.3185 lebih besar dari alpha 5% ($\alpha = 0.05$). Artinya, bahwa variabel pada bidang pendidikan tidak berpengaruh nyata terhadap

ketimpangan pendapatan daerah. Hasil studi terkait tidak sejalan dengan kajian Rahayuningtias (2014).

Variabel infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Ada beberapa dugaan penyebab hal tersebut, kemungkinan disetiap daerah masih belum meratanya masyarakat bisa menikmati fasilitas pendidikan diberikan oleh pemerintah, terutama dari sisi kualitas. Penyebab lain di tunjukan pada tingkat pendidikan yang rendah, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta keterbatasan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat, sebab itu dampak yang ditimbulkan pada pertumbuhan ekonomi yaitu semakin bertambahnya tingkat ketimpangan pendapatan serta berpengaruh pada tingkat kemiskinan, karena kurangnya pendidikan yang diberikan sehingga masyarakat tidak bisa bersaing.

Nilai koefisien laju pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 0.020952. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha sebesar 5% ($\alpha = 0.05$), sehingga dapat dijelaskan bahwa H_0 tidak ditolak. Artinya variabel pada bidang Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Jika PDRB naik 1% maka Indeks Gini sebesar 0.020952 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Hasil studi terkait tidak sejalan dengan kajian Manupada (2014).

Variabel laju pertumbuhan PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Ada beberapa dugaan penyebab hal tersebut, kemungkinan di beberapa daerah masih belum meratanya pendapatan yang diterima oleh masyarakat, disebabkan oleh peluang kesempatan kerja yang

kurang, sarana fasilitas infrastruktur pendidikan rendah berdampak pada sumber daya manusia yang rendah dimana masyarakat tidak bisa bersaing, keterampilan yang dimiliki masyarakat terbatas, dan jalan yang rendah menimbulkan dampak dimana masyarakat harus mengeluarkan biaya dan waktu yang lebih banyak. Kondisi tersebut pada gilirannya akan meningkatkan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2015, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2015.
2. Pembangunan infrastruktur kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2015.
3. Pembangunan infrastruktur pendidikan (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2015.
4. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2015.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Perbaikan pada sarana infrastruktur jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota) perlu dilakukan khususnya di daerah plosok agar potensi yang ada di daerah tersebut bisa berkembang dan maju, sehingga daerah plosok dapat bersaing karena meratanya sarana jalan yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah membangun sarana infrastruktur jalan agar masyarakat dapat bekerja secara optimal, dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, sehingga tingkat ketimpangan pendapatan menurun.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya sarana infrastruktur kesehatan dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah membangun sarana infrastruktur kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling) yang memadai supaya masyarakat daerah dapat memahami dengan benar tentang gizi dan kesehatan, sehingga masyarakat bisa memberikan kontribusi kualitas sumber daya manusia yang jauh lebih baik agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.
3. Pemerintah melakukan perbaikan pada sarana infrastruktur pendidikan (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA) dengan mengupayakan pembangunan perpustakaan di setiap daerah harapannya agar masyarakat memiliki wawasan yang lebih luas dengan membaca, pemerintah membuat Program Indonesia Pintar gunanya agar partisipasi sekolah khususnya bagi masyarakat kurang mampu atau miskin bisa

menikmati bangku pendidikan yang lebih layak, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara memberikan pelatihan pada guru atau tenaga kerja yang tersedia karena perlu disadari bahwa daerah atau bangsa yang memiliki budaya literasi yang baik merupakan salah satu ciri bangsa yang cerdas sehingga masyarakat mampu memanfaatkan informasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup.

4. Perbaikan pada kualitas sumber daya manusia perlu di tingkatkan harapannya supaya produktivitas disuatu daerah bisa meningkat, sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha untuk melakukan pemerataan di masyarakat dengan cara membangun sarana infrastruktur agar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bisa meningkat sehingga berbagai macam investor bisa dengan mudah menanamkan investasi karena melihat kestabilan perekonomiannya, pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan suatu peluang bagi masyarakat yaitu dengan memberikan berbagai macam pelatihan untuk tenaga kerja, serta masyarakat memperoleh pendidikan yang layak agar bisa bersaing.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan bukan hanya meneliti mengenai infrastruktur jalan (nasional, provinsi, kabupaten atau kota) dan banyaknya jumlah fasilitas infrastruktur sosial (kesehatan dan pendidikan) dalam unit saja tetapi infrastruktur lainnya yang berupa listrik, air, dan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arsyad, L., (1992), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Gujarati, D.N dan Porter, D.C., (2009), *Besic Econometrics, Fifth Edition*, McGraw-Hill Education, 2 Pen Plaza, New York.
- Kuncoro, M., (2003), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ketiga, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, M., (2010), *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, Edisi Lima, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Kodoatie, R.J., (2003), *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Maipita, I., (2014), *Mengukur Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan*, Edisi Satu, (UPP) STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mankiw, N.G., (2003), *Teori Makroekonomi*, Edisi kelima, Erlangga, Jakarta
- Sukirno, S., (1985), *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Sengan Bima Grafika, Jakarta.
- Tarigan, R, M.R.P.Drs., (2006), *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Edisi Revisi, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, M.P., dan Smith, S.C., (2009), *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesebelas, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- Walker, C.S., dan Eleonora, B., (2015), *Prakarsa Compendum*, Jilid 2, Prakarsa Infrastruktur Indonesia, Jakarta.
- Widarjono, A., (2013), *Ekonometrika: Teori dan Aplikasinya*, Edisi Keempat, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Winarno, W.W., (2009), *Analisis Ekonometrika dan Statistika*, edisi kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

B. Brosur/Artikel/Skripsi/Thesis

Abdul Maqin., “Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat”, *Jurnal Ekonomi & studi pembangunan*, Juni 2011, Vol. 10, No 1, hal 10-18.

Amrillah dan Mahaendra Yasa, I.N., 2013, “Analisis Disparitas Pendapatan Per Kapita Antar Kecamatan dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Di Kabupaten Karangasem”, *E-jurnal Ekonomi Pembangunan*, April 2013, Vol. 2, No 4, hal 181-189.

Bajar, Sumedha; Rajeev, Meenakshi., “*The Impact Of Infrastructure Provisioning On Inequality: Evidence From India*”, Global Labour University (GLU) 2015, 35p, No 35.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, “Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah”, pada tanggal 13 Februari 2017.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, “Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi”, pada tanggal 13 Februari 2017.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, “Jawa Tengah Dalam Angka”, pada tanggal 22 Agustus 2017.

Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPENAS), “Laporan Akhir Analisis Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015”, pada tanggal 13 September 2017.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, “Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah”, pada tanggal 18 September 2017.

Bappenas, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Saerah (RPJMD) provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018”, pada tanggal 20 Agustus 2017.

Bank Indonesia, “Informasi Dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)”, http://www.bi.go.id/id/statistik/metadana/sekda/Documents/8PDRBE_KDA1.pdf, pada tanggal 27 Oktober 2017

Berita terkini, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, <http://www.worldbank.org/in/news/pressrelease/2014/12/08/indonesia->

[togrow-by-5-2-percent-in-2015-world-bank-report](#), pada tanggal 03 April 2017.

Irawan, A., (2015), "Regional Income Disparities in Indonesia: *Mmeasurements Convergence Process, and Decentralisation. Bulletin of Indonesian Economic Studies*", 51(1): 148-149.

Manupada, N.P.M., (2014), "Keterkaitan Antara Infrastruktur Dan Pendapatan Per Kapita: Perbandingan Daerah Kaya Dan Miskin Di Indonesia 2003-2012", *Jurnal Ekonomi & studi pembangunan*, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institute Pertanian Bogor, Bogor.

Maryaningsih, Novi *et al.*, (2012), "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi & studi pembangunan*, JEL: 047, 011, 018, R11.

Mirza, D.S., (2012), "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, diakses dari <http://journal.unnes.ac.id> pada tanggal 24 Februari 2017.

Putra, M.U.M., dan Parimin., (2015), "Peran Pendidikan Dalam Esensi Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Asahan (Studi Kasus: Beberapa Sekolah Di Kisaran Barat)", *Jurnal Ekonomi & studi pembangunan*, volume 5, nomor 02, hal 124.

Rahayuningtias, P., (2014), "Keterkaitan Antara Ketersediaan Infrastruktur Dan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Data Kabupaten/Kota 2008-2011", *Jurnal Ekonomi & studi pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Sukmawati, D.A., (2016), "Pengaruh Penyediaan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2005-2013", *Jurnal Ekonomi & studi pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Tampubolon, N.H., (2013), "Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan per kapita: Analisis Provinsi di Indonesia 2007-2011", *Jurnal Ekonomi & studi pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Wahyuni, K.T., (2009), “Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Terhadap Produktivitas Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & studi pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor.





Lampiran 1

Hasil Estimasi *Common Effect*

Dependent Variable: R
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 11/13/17 Time: 01:36
 Sample: 2001 2015
 Periods included: 15
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 525
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JL	1.06E-07	8.22E-08	1.285317	0.1993
KES	-2.88E-05	1.75E-05	-1.648629	0.0998
PEND	-5.13E-06	5.83E-06	-0.880332	0.3791
PE	0.021421	0.001631	13.13682	0.0000
C	0.177054	0.009009	19.65287	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.259525	Mean dependent var	0.299415
Adjusted R-squared	0.253829	S.D. dependent var	0.086537
S.E. of regression	0.047634	Sum squared resid	1.179860
F-statistic	45.56289	Durbin-Watson stat	0.955258
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.158495	Mean dependent var	0.274648
Sum squared resid	1.197006	Durbin-Watson stat	0.877231

Lampiran 2

Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Dependent Variable: R

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 11/13/17 Time: 01:39

Sample: 2001 2015

Periods included: 15

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 525

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JL	5.46E-06	1.59E-06	3.435993	0.0006
KES	-3.42E-05	1.79E-05	-1.916567	0.0559
PEND	1.15E-05	1.16E-05	0.998577	0.3185
PE	0.020952	0.001654	12.67080	0.0000
C	-0.242849	0.118993	-2.040870	0.0418

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.447353	Mean dependent var	0.314077
Adjusted R-squared	0.404142	S.D. dependent var	0.107373
S.E. of regression	0.044612	Sum squared resid	0.967257
F-statistic	10.35273	Durbin-Watson stat	1.223360
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.316206	Mean dependent var	0.274648
Sum squared resid	0.972670	Durbin-Watson stat	1.062918

Lampiran 3

Hasil Estimasi *Random Effect*

Dependent Variable: R
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/14/17 Time: 03:04
 Sample: 2001 2015
 Periods included: 15
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 525
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JL	7.13E-08	1.28E-07	0.557734	0.5773
KES	-3.98E-05	2.01E-05	-1.978073	0.0484
PEND	1.56E-06	8.35E-06	0.186884	0.8518
PE	0.018837	0.001838	10.25040	0.0000
C	0.185419	0.012407	14.94428	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.014694	0.0976
Idiosyncratic random			0.044682	0.9024
Weighted Statistics				
R-squared	0.174980	Mean dependent var	0.169608	
Adjusted R-squared	0.168634	S.D. dependent var	0.049768	
S.E. of regression	0.045378	Sum squared resid	1.070776	
F-statistic	27.57195	Durbin-Watson stat	0.937293	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.162206	Mean dependent var	0.274648	
Sum squared resid	1.191728	Durbin-Watson stat	0.853288	

Lampiran 4

Hasil Estimasi *Chow Test*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.960432	(34,486)	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: R

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 11/14/17 Time: 02:49

Sample: 2001 2015

Periods included: 15

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 525

Use pre-specified GLS weights

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JL	1.37E-07	9.14E-08	1.500029	0.1342
KES	-3.03E-05	1.92E-05	-1.572722	0.1164
PEND	-7.75E-06	6.08E-06	-1.273749	0.2033
PE	0.019804	0.001707	11.60018	0.0000
C	0.182922	0.009470	19.31567	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.216907	Mean dependent var	0.314077
Adjusted R-squared	0.210883	S.D. dependent var	0.107373
S.E. of regression	0.051340	Sum squared resid	1.370588
F-statistic	36.00840	Durbin-Watson stat	0.867665
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.158668	Mean dependent var	0.274648
Sum squared resid	1.196761	Durbin-Watson stat	0.856001

Lampiran 5

Hasil Estimasi Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.328361	4	0.0004

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
JL	0.000006	0.000000	0.000000	0.0010
KES	-0.000038	-0.000040	0.000000	0.7025
PEND	0.000018	0.000002	0.000000	0.1286
PE	0.019421	0.018837	0.000000	0.2861

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: R

Method: Panel Least Squares

Date: 11/14/17 Time: 03:05

Sample: 2001 2015

Periods included: 15

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 525

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.320537	0.147493	-2.173225	0.0302
JL	6.50E-06	1.96E-06	3.316905	0.0010
KES	-3.75E-05	2.10E-05	-1.788146	0.0744
PEND	1.75E-05	1.34E-05	1.306131	0.1921
PE	0.019421	0.001917	10.12878	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.317875	Mean dependent var	0.274648
Adjusted R-squared	0.264540	S.D. dependent var	0.052102
S.E. of regression	0.044682	Akaike info criterion	-3.307104
Sum squared resid	0.970296	Schwarz criterion	-2.990394
Log likelihood	907.1148	Hannan-Quinn criter.	-3.183088
F-statistic	5.959975	Durbin-Watson stat	1.054043
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6**Hasil Estimasi Uji Multikorelasi**

	R	JL	KES	PEND	PE
R	1.000000	0.024039	-0.080586	-0.009153	0.397364
JL	0.024039	1.000000	0.266312	0.708151	-0.008958
KES	-0.080586	0.266312	1.000000	0.249387	-0.058769
PEND	-0.009153	0.708151	0.249387	1.000000	-0.016827
PE	0.397364	-0.008958	-0.058769	-0.016827	1.000000



Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
3	Kab. Purbalingga	2001	0.21	73058	172	1100	3.50
		2002	0.21	73058	172	894	4.13
		2003	0.25	73058	99	929	3.16
		2004	0.25	73058	103	941	3.34
		2005	0.27	73058	103	967	4.18
		2006	0.29	73058	103	966	5.06
		2007	0.27	73058	104	961	6.19
		2008	0.24	73058	104	1018	5.30
		2009	0.27	73058	104	1033	5.89
		2010	0.24	73058	104	1057	5.67
		2011	0.28	73058	92	1065	6.03
		2012	0.33	73058	92	1067	6.26
		2013	0.32	73058	92	1069	5.66
		2014	0.30	73058	81	1073	4.85
		2015	0.30	73058	122	812	5.43
4	Kab. Banjarnegara	2001	0.18	78236	134	1155	0.07
		2002	0.18	78236	134	1104	0.85
		2003	0.23	78236	129	1174	2.96
		2004	0.21	78236	115	1249	3.81
		2005	0.26	78236	124	1241	3.95
		2006	0.22	78236	123	1524	4.35
		2007	0.27	78236	124	1500	5.01
		2008	0.29	78199	126	1291	4.98
		2009	0.26	78199	126	1297	5.11
		2010	0.26	78236	124	1304	4.89
		2011	0.36	78236	124	1321	4.92
		2012	0.33	78236	124	1337	5.25
		2013	0.39	78236	124	1357	5.28
		2014	0.34	78236	112	1344	5.31
		2015	0.34	78236	161	1038	5.47

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
5	Kab. Kebumen	2001	0.22	68038	228	1460	1.47
		2002	0.22	68038	228	1541	3.88
		2003	0.24	68038	140	1769	3.11
		2004	0.19	68942	151	1801	1.18
		2005	0.23	68942	160	1821	3.20
		2006	0.24	68942	136	1829	4.08
		2007	0.24	68942	149	1438	4.52
		2008	0.27	68402	154	1840	5.80
		2009	0.24	68402	154	1818	3.94
		2010	0.23	68038	155	1828	4.15
		2011	0.34	68038	155	1830	4.23
		2012	0.35	68038	158	1831	5.59
		2013	0.31	68038	159	1888	4.24
		2014	0.28	68038	149	1895	5.79
		2015	0.28	68038	213	1223	6.28
6	Kab. Purworejo	2001	0.24	116418	250	1227	3.55
		2002	0.24	116418	250	1178	4.88
		2003	0.21	116418	122	1169	3.64
		2004	0.24	116418	120	861	4.17
		2005	0.28	116418	119	1152	4.85
		2006	0.27	116418	119	1155	5.23
		2007	0.23	116418	124	1126	6.08
		2008	0.27	116192	123	1154	5.62
		2009	0.29	116192	145	1138	4.96
		2010	0.29	116378	127	1206	5.01
		2011	0.36	116418	128	1200	5.02
		2012	0.31	116418	128	1200	5.04
		2013	0.34	116418	128	1161	4.99
		2014	0.38	116418	116	1142	4.48
		2015	0.38	116418	165	740	5.37

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
7	Kab. Wonosobo	2001	0.24	95487	207	1269	1.03
		2002	0.24	95487	186	1015	2.11
		2003	0.26	95487	93	1005	2.28
		2004	0.25	95487	95	1056	2.34
		2005	0.27	95487	102	1076	3.19
		2006	0.24	95487	100	1005	3.23
		2007	0.22	95487	104	987	3.58
		2008	0.29	96063	104	1047	3.69
		2009	0.24	96063	106	1054	4.02
		2010	0.25	95467	106	1076	4.29
		2011	0.35	95487	106	1072	4.52
		2012	0.38	95487	108	1187	5.14
		2013	0.34	95487	108	1180	4.98
		2014	0.35	95487	100	1179	4.78
		2015	0.35	95487	130	750	4.85
8	Kab. Magelang	2001	0.21	81139	176	1412	2.32
		2002	0.21	81139	176	1572	4.16
		2003	0.22	81139	125	1512	4.01
		2004	0.21	81139	127	1541	4.03
		2005	0.30	81139	128	1550	4.62
		2006	0.25	81139	132	1558	4.91
		2007	0.27	81139	130	1354	5.21
		2008	0.30	80908	130	1548	4.99
		2009	0.26	80908	126	1563	4.72
		2010	0.25	80925	127	1581	4.51
		2011	0.32	81139	128	1583	4.27
		2012	0.33	81139	128	1673	5.84
		2013	0.34	81139	128	1591	5.60
		2014	0.34	81139	125	1629	5.38
		2015	0.34	81139	237	1225	5.03

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
9	Kab. Boyolali	2001	0.23	63218	133	1353	6.33
		2002	0.23	63218	214	1473	2.59
		2003	0.23	63218	112	1468	4.86
		2004	0.22	63218	114	1493	3.43
		2005	0.28	63218	111	1513	4.07
		2006	0.26	63218	110	1484	4.19
		2007	0.16	63218	115	1449	4.08
		2008	0.28	63125	134	1491	4.04
		2009	0.26	63125	134	1455	5.16
		2010	0.27	63218	131	1555	3.60
		2011	0.36	63218	120	1555	5.28
		2012	0.38	63218	120	1555	5.66
		2013	0.40	63218	120	1585	5.43
		2014	0.30	63218	106	1555	5.42
		2015	0.30	63218	184	1006	5.91
10	Kab, Klaten	2001	0.24	85933	384	1487	4.34
		2002	0.24	85933	384	1606	3.91
		2003	0.27	85933	158	1953	4.94
		2004	0.25	85933	159	1913	4.86
		2005	0.29	85933	161	1967	4.59
		2006	0.23	85933	174	1968	2.30
		2007	0.20	85933	162	1950	3.31
		2008	0.31	85974	169	1604	3.93
		2009	0.23	85974	170	2051	4.24
		2010	0.25	89680	170	2002	1.73
		2011	0.32	89680	166	2015	1.96
		2012	0.33	89680	166	2017	5.54
		2013	0.34	89680	166	2034	5.79
		2014	0.36	89680	150	1993	5.84
		2015	0.36	89680	229	1083	5.30

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)

Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
11	Kab, Sukoharjo	2001	0.24	127935	138	984	3.87
		2002	0.24	127935	138	1009	2.73
		2003	0.22	127935	92	1028	3.97
		2004	0.23	127935	88	1011	4.33
		2005	0.27	127935	97	1023	4.11
		2006	0.21	127935	99	1023	4.53
		2007	0.17	127935	102	990	5.11
		2008	0.24	127763	102	1021	4.84
		2009	0.25	127763	151	1016	4.76
		2010	0.30	127783	149	1027	4.65
		2011	0.33	127935	148	1027	4.59
		2012	0.35	127935	148	1251	5.03
		2013	0.34	127935	148	1262	5.01
		2014	0.35	127935	138	1238	5.40
		2015	0.35	127935	118	691	5.69
12	Kab. Wonogiri	2001	0.23	121573	199	1544	2.09
		2002	0.23	121573	199	1226	3.18
		2003	0.22	121573	204	1510	2.53
		2004	0.24	121573	199	1509	4.10
		2005	0.26	121573	214	1573	4.31
		2006	0.24	121573	207	1492	4.07
		2007	0.25	121573	206	1476	5.07
		2008	0.27	121576	219	1542	4.27
		2009	0.29	121576	219	1468	4.73
		2010	0.29	121574	219	1524	5.87
		2011	0.35	124165	216	1564	2.24
		2012	0.32	124165	216	1582	5.87
		2013	0.34	124165	216	1563	4.63
		2014	0.33	124165	211	1581	5.26
		2015	0.33	124165	222	1037	5.40

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
13	Kab. Karanganyar	2001	0.32	86951	174	1214	4.97
		2002	0.32	86951	174	1220	5.53
		2003	0.24	86951	113	1211	5.63
		2004	0.24	86951	115	1226	5.98
		2005	0.27	86951	114	1239	5.49
		2006	0.26	86951	115	1104	5.08
		2007	0.17	86951	136	1029	5.74
		2008	0.29	86947	136	1148	5.30
		2009	0.31	86947	112	1148	5.54
		2010	0.29	87069	112	1213	5.42
		2011	0.37	86951	122	1214	5.55
		2012	0.40	86951	122	1217	5.82
		2013	0.33	86951	122	1285	5.38
		2014	0.36	86951	109	1288	5.22
		2015	0.36	86951	141	777	5.05
14	Kab. Sragen	2001	0.23	105340	186	1216	2.96
		2002	0.23	105340	186	1196	3.42
		2003	0.26	105340	124	1260	3.63
		2004	0.22	105340	127	1315	4.93
		2005	0.26	105340	127	1344	5.16
		2006	0.27	105340	127	1351	5.18
		2007	0.27	105340	135	1324	5.73
		2008	0.27	106330	136	1721	5.69
		2009	0.24	106330	163	1750	6.01
		2010	0.28	105340	164	1379	6.09
		2011	0.35	105340	137	1389	6.53
		2012	0.37	105340	136	1392	6.60
		2013	0.35	105340	136	1464	6.64
		2014	0.33	105340	126	1472	5.59
		2015	0.33	105340	161	919	6.05

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
15	Kab. Grobogan	2001	0.22	110851	230	1514	4.28
		2002	0.22	110851	230	1589	5.77
		2003	0.23	110851	129	1587	2.20
		2004	0.23	110851	133	1820	3.78
		2005	0.22	110851	134	1808	4.74
		2006	0.22	110851	138	1899	4.00
		2007	0.22	110851	141	1869	4.37
		2008	0.26	110851	163	1904	5.33
		2009	0.23	110851	163	1822	5.03
		2010	0.28	110851	160	1948	5.05
		2011	0.32	110851	139	1969	3.59
		2012	0.35	110851	142	1963	6.16
		2013	0.34	110851	143	1903	4.59
		2014	0.34	110851	130	2011	4.07
		2015	0.34	110851	165	1265	5.96
16	Kab. Blora	2001	0.23	68271	296	1149	2.15
		2002	0.23	68271	296	1031	2.18
		2003	0.19	68271	108	1287	3.48
		2004	0.20	68271	109	1291	3.82
		2005	0.25	68271	109	1296	4.32
		2006	0.26	68271	111	1365	4.15
		2007	0.27	68271	122	1341	3.77
		2008	0.32	69030	123	1393	5.80
		2009	0.25	69030	95	1402	4.97
		2010	0.26	69030	95	1381	5.04
		2011	0.33	68271	110	1377	2.70
		2012	0.38	68271	113	1390	5.02
		2013	0.41	68271	113	1458	5.01
		2014	0.39	68271	103	1404	4.39
		2015	0.39	68271	134	895	5.36

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
17	Kab. Rembang	2001	0.25	67907	174	1066	4.52
		2002	0.25	67907	174	1179	3.37
		2003	0.18	67907	98	866	3.01
		2004	0.19	67907	98	878	4.53
		2005	0.20	67907	112	888	3.56
		2006	0.20	67907	112	851	5.53
		2007	0.20	67907	112	837	3.81
		2008	0.31	67301	112	882	4.67
		2009	0.21	67301	125	893	4.46
		2010	0.19	67907	125	900	4.45
		2011	0.27	67907	113	903	4.40
		2012	0.33	67907	113	913	4.88
		2013	0.32	67907	113	932	5.03
		2014	0.33	67907	103	929	5.15
		2015	0.33	67907	124	570	5.50
18	Kab. Pati	2001	0.19	69071	298	1426	3.90
		2002	0.19	69071	299	1214	3.00
		2003	0.18	69071	111	1528	2.31
		2004	0.19	69071	113	1530	4.25
		2005	0.21	69071	111	1576	3.94
		2006	0.19	69071	117	1603	4.45
		2007	0.21	69071	112	1585	5.19
		2008	0.29	69122	113	1636	4.94
		2009	0.26	69122	112	1656	4.69
		2010	0.24	69071	115	1680	5.11
		2011	0.29	69071	115	1655	5.43
		2012	0.29	69071	114	2488	5.92
		2013	0.30	69071	114	1561	5.72
		2014	0.31	69071	108	1695	4.64
		2015	0.31	69071	164	1223	5.94

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
19	Kab. Kudus	2001	0.22	54461	282	963	6.06
		2002	0.22	54461	282	1043	5.44
		2003	0.20	54461	83	919	5.56
		2004	0.18	54461	81	942	8.39
		2005	0.20	54461	83	944	4.43
		2006	0.18	54461	84	956	2.46
		2007	0.24	54461	84	944	3.33
		2008	0.22	54454	90	941	3.92
		2009	0.25	54454	84	992	3.95
		2010	0.24	54461	84	998	4.17
		2011	0.35	54461	83	1005	4.21
		2012	0.34	54461	83	1014	4.33
		2013	0.34	54461	83	1112	4.68
		2014	0.37	54461	77	1015	4.42
		2015	0.37	54461	82	793	3.90
20	Kab. Jepara	2001	0.22	81075	167	1196	3.70
		2002	0.22	81075	167	1219	4.01
		2003	0.22	81075	91	1278	3.76
		2004	0.21	81075	87	1276	4.00
		2005	0.21	81075	91	1342	4.23
		2006	0.20	81075	97	1365	4.19
		2007	0.23	81075	98	1356	4.74
		2008	0.27	81075	99	1376	4.49
		2009	0.22	81075	102	1000	5.02
		2010	0.20	81075	102	1496	4.52
		2011	0.32	81075	99	1498	5.44
		2012	0.35	81075	99	1518	5.79
		2013	0.33	81075	99	1461	5.77
		2014	0.31	81075	85	1554	4.81
		2015	0.31	81075	114	1106	5.04

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)

Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
21	Kab. Demak	2001	0.20	50742	152	1196	3.32
		2002	0.20	50742	152	1218	2.75
		2003	0.24	50742	104	1157	2.83
		2004	0.24	50917	99	1267	3.40
		2005	0.30	50917	105	1291	3.86
		2006	0.27	50917	108	1291	4.02
		2007	0.24	50917	123	1281	4.15
		2008	0.24	50753	123	1350	4.11
		2009	0.22	50753	112	1368	4.08
		2010	0.24	50742	112	1382	4.12
		2011	0.31	50742	99	1375	4.48
		2012	0.34	50742	105	1435	4.64
		2013	0.33	50742	105	1380	4.62
		2014	0.32	50742	93	1388	4.29
		2015	0.32	50742	126	985	5.93
22	Kab. Semarang	2001	0.23	86302	254	1113	5.13
		2002	0.23	86302	254	1041	5.45
		2003	0.22	86302	120	1167	3.75
		2004	0.24	86302	123	1198	1.46
		2005	0.24	86302	123	1188	3.11
		2006	0.28	86302	122	1194	3.81
		2007	0.19	86302	141	1166	4.72
		2008	0.27	86679	146	1223	4.26
		2009	0.26	86679	143	1224	4.37
		2010	0.28	94244	141	1207	4.90
		2011	0.33	94228	133	1308	5.56
		2012	0.36	94228	134	1249	6.02
		2013	0.31	94228	134	1408	5.62
		2014	0.31	94228	123	1264	5.85
		2015	0.31	94228	155	898	5.52

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
23	Kab. Temanggung	2001	0.32	71332	200	991	4.18
		2002	0.32	71332	202	1011	3.05
		2003	0.23	71332	87	1007	3.37
		2004	0.26	71332	90	987	3.92
		2005	0.28	71332	91	997	3.99
		2006	0.33	71332	89	1000	3.31
		2007	0.24	71332	91	987	4.03
		2008	0.25	71300	91	1021	3.54
		2009	0.27	71300	91	1045	4.09
		2010	0.28	71312	92	1029	4.31
		2011	0.38	71332	90	1033	4.65
		2012	0.35	71332	90	1033	5.04
		2013	0.34	71332	90	1039	5.02
		2014	0.38	71332	87	1055	5.03
		2015	0.38	71332	152	737	5.21
24	Kab. Kendal	2001	0.25	88097	206	1168	3.53
		2002	0.25	88097	205	1044	3.41
		2003	0.24	88097	105	1217	2.85
		2004	0.22	89358	106	1197	2.61
		2005	0.27	89358	106	1226	2.63
		2006	0.25	89358	123	1207	3.67
		2007	0.19	89358	113	1188	4.31
		2008	0.25	88145	113	1105	4.26
		2009	0.28	88145	121	1121	5.55
		2010	0.27	89505	123	1144	5.97
		2011	0.37	89505	119	1164	5.99
		2012	0.36	89505	119	1356	5.54
		2013	0.32	89505	119	1360	5.24
		2014	0.34	89505	108	1360	5.14
		2015	0.34	89505	143	887	5.25

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)

Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
25	Kab. Batang	2001	0.21	48648	121	792	2.21
		2002	0.21	48648	121	928	2.17
		2003	0.24	48648	89	857	2.55
		2004	0.25	48648	89	887	2.07
		2005	0.26	48648	94	899	2.80
		2006	0.23	48648	102	872	2.51
		2007	0.16	48648	93	874	3.49
		2008	0.25	48430	93	952	3.67
		2009	0.27	48430	91	899	3.72
		2010	0.28	46792	93	927	4.97
		2011	0.28	46792	92	952	5.26
		2012	0.31	46792	92	994	5.02
		2013	0.30	46792	92	1002	5.17
		2014	0.29	46792	87	988	5.31
		2015	0.29	46792	123	725	5.42
26	Kab. Pekalongan	2001	0.21	60416	262	894	2.44
		2002	0.21	60416	262	1194	2.87
		2003	0.23	60416	106	968	3.66
		2004	0.21	60416	107	999	4.39
		2005	0.23	60416	111	1004	3.98
		2006	0.24	60416	111	1027	4.21
		2007	0.22	60416	111	1015	4.59
		2008	0.25	60842	111	1057	4.78
		2009	0.20	60842	109	1089	4.30
		2010	0.23	60874	108	1111	4.27
		2011	0.28	60416	111	1118	4.77
		2012	0.28	60416	112	1132	5.32
		2013	0.27	60416	112	1137	5.45
		2014	0.29	60416	105	1146	4.95
		2015	0.29	60416	141	844	4.78

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling).

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
27	Kab. Pematang	2001	0.21	75569	176	1334	3.04
		2002	0.21	75569	166	1219	3.43
		2003	0.25	75569	106	1266	3.35
		2004	0.23	75569	96	1268	3.84
		2005	0.23	75569	101	1258	4.05
		2006	0.24	75569	106	1270	3.72
		2007	0.22	75569	106	1285	4.47
		2008	0.21	76676	107	1307	4.99
		2009	0.22	76676	116	1254	4.78
		2010	0.20	77405	116	1380	4.94
		2011	0.26	77425	102	1406	4.83
		2012	0.25	77425	102	1471	5.28
		2013	0.24	77425	102	1592	5.41
		2014	0.28	77425	98	1487	5.52
		2015	0.28	77425	116	1111	5.58
28	Kab. Tegal	2001	0.23	72408	284	1352	3.69
		2002	0.23	72408	284	1422	5.14
		2003	0.23	72408	123	1291	5.54
		2004	0.27	72408	123	1302	5.29
		2005	0.26	72408	123	1307	4.72
		2006	0.21	72408	116	1305	5.19
		2007	0.19	72408	116	1299	5.59
		2008	0.25	71929	117	1328	5.32
		2009	0.27	71929	126	1385	5.29
		2010	0.30	72163	125	1395	4.83
		2011	0.28	72408	126	1395	4.81
		2012	0.32	72408	126	1473	5.25
		2013	0.32	72408	128	1471	5.60
		2014	0.33	72408	120	1556	5.03
		2015	0.33	72408	154	1271	5.45

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
29	Kab. Brebes	2001	0.23	88619	177	1257	6.19
		2002	0.23	88619	177	688	5.09
		2003	0.22	88619	135	1545	4.85
		2004	0.21	89055	129	1570	4.83
		2005	0.27	89055	134	1605	4.80
		2006	0.22	89055	142	1630	4.71
		2007	0.21	89055	142	1604	4.79
		2008	0.26	89031	142	1693	4.81
		2009	0.23	89031	152	1725	4.99
		2010	0.23	88864	161	1739	4.94
		2011	0.33	88619	149	1741	4.97
		2012	0.32	88619	150	1768	5.21
		2013	0.31	88619	150	1785	5.06
		2014	0.32	88619	132	1791	5.30
		2015	0.32	88619	172	1451	5.98
30	Kota Magelang	2001	0.28	10452	355	209	3.44
		2002	0.28	10452	355	421	3.01
		2003	0.25	10452	21	204	3.74
		2004	0.29	10452	29	206	3.71
		2005	0.28	10452	22	204	4.33
		2006	0.25	10452	25	206	2.44
		2007	0.27	10452	25	249	5.17
		2008	0.26	10478	25	202	5.05
		2009	0.28	10478	56	202	5.11
		2010	0.31	10334	56	203	6.12
		2011	0.34	10452	27	208	5.48
		2012	0.37	10452	27	209	6.48
		2013	0.33	10452	27	243	5.91
		2014	0.36	10452	27	242	4.98
		2015	0.36	10452	20	172	5.11

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)

Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
31	Kota Surakarta	2001	0.29	27456	603	741	4.12
		2002	0.29	27456	520	532	4.97
		2003	0.26	27456	53	714	6.11
		2004	0.29	27456	65	710	5.80
		2005	0.28	27456	59	716	5.15
		2006	0.29	27456	62	789	5.43
		2007	0.21	27456	62	750	5.82
		2008	0.27	27436	59	725	5.69
		2009	0.27	27436	62	726	5.90
		2010	0.34	27456	62	576	5.94
		2011	0.34	27456	61	944	6.04
		2012	0.35	27456	62	947	6.12
		2013	0.37	27456	62	929	5.89
		2014	0.35	27456	62	938	5.28
		2015	0.35	27456	62	439	5.44
32	Kota Salatiga	2001	0.29	14479	216	313	6.51
		2002	0.29	14479	216	810	4.33
		2003	0.29	14479	29	226	4.25
		2004	0.28	14479	34	233	4.24
		2005	0.29	14479	27	229	4.15
		2006	0.29	14479	38	234	4.17
		2007	0.30	14479	37	227	5.39
		2008	0.32	14895	37	231	4.98
		2009	0.29	14895	69	253	4.48
		2010	0.35	14504	69	249	5.01
		2011	0.35	14479	28	251	5.25
		2012	0.35	14479	28	272	5.95
		2013	0.35	14479	28	261	6.09
		2014	0.31	14479	27	260	5.57
		2015	0.31	14479	30	165	5.17

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota		Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
33	Kota Semarang	2001	0.30	72717	1268	1560	4.70
		2002	0.30	72717	1258	970	4.33
		2003	0.28	72717	115	1714	4.04
		2004	0.24	72717	119	1656	4.13
		2005	0.25	72717	118	1668	5.13
		2006	0.29	72717	116	1692	5.71
		2007	0.30	72717	118	1620	5.98
		2008	0.26	72091	118	1693	5.59
		2009	0.37	72091	120	1702	5.34
		2010	0.32	72353	120	1734	5.87
		2011	0.31	72717	120	1636	6.41
		2012	0.33	72717	120	1556	6.42
		2013	0.32	72717	120	1761	6.20
		2014	0.34	72717	107	1765	6.31
		2015	0.34	72717	162	1008	5.80
34	Kota Pekalongan	2001	0.25	12789	248	303	5.43
		2002	0.25	12789	248	317	1.94
		2003	0.22	12789	42	482	3.86
		2004	0.19	12789	43	313	4.07
		2005	0.27	12789	44	305	3.82
		2006	0.24	12789	49	304	3.06
		2007	0.28	12789	50	296	3.80
		2008	0.25	12472	51	296	3.73
		2009	0.25	12472	51	301	4.78
		2010	0.28	12360	51	298	5.51
		2011	0.32	12789	49	300	5.45
		2012	0.33	12789	49	303	5.60
		2013	0.32	12789	49	310	5.89
		2014	0.31	12789	49	286	5.48
		2015	0.31	12789	42	212	5.00

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Kabupaten / Kota	Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)	
35	Kota Tegal	2001	0.24	16233	395	281	7.73
		2002	0.24	16233	395	276	4.82
		2003	0.22	16233	37	280	5.82
		2004	0.23	16233	42	276	5.85
		2005	0.23	16233	42	276	4.87
		2006	0.24	16233	39	275	5.15
		2007	0.23	16233	38	265	5.21
		2008	0.28	16751	38	281	5.15
		2009	0.24	16751	38	228	5.02
		2010	0.24	16233	38	408	4.61
		2011	0.28	16233	34	289	4.58
		2012	0.25	16233	38	291	5.07
		2013	0.25	16233	38	410	4.93
		2014	0.25	16233	37	410	5.04
		2015	0.25	16233	19	341	5.45

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)

Lampiran 7

Data yang diperoleh (Rasio Gini, Jalan, Rumah Sakit, Gedung Sekolah, Growth) Tahun 2001-2015

Kabupaten / Kota	Tahun	Rasio Gini (Persen)	Jalan (Nasional, Provinsi, Kab/Kota)	Rumah Sakit (Unit)	Gedung Sekolah (Unit)	Growth (Persen)
1 Kab. Cilacap	2001	0.20	123460	341	1868	4.97
	2002	0.20	123460	341	1904	8.59
	2003	0.24	123460	156	1893	6.32
	2004	0.23	123460	153	1828	6.65
	2005	0.29	123460	154	1859	7.72
	2006	0.26	123460	156	1869	5.11
	2007	0.27	123460	160	1827	2.64
	2008	0.24	123633	160	1874	6.07
	2009	0.27	123633	162	1970	1.53
	2010	0.25	127890	163	1837	4.41
	2011	0.30	127890	166	1802	4.07
	2012	0.32	127890	165	1914	3.03
	2013	0.37	127890	165	1901	2.41
	2014	0.34	127890	151	1953	2.92
	2015	0.34	127890	220	1614	5.94
2 Kab. Banyumas	2001	0.22	151721	842	2002	6.00
	2002	0.22	151721	842	1974	3.66
	2003	0.28	151721	127	2065	3.71
	2004	0.28	153222	127	2047	4.17
	2005	0.25	153222	132	1990	3.21
	2006	0.29	153222	127	1978	4.48
	2007	0.25	153222	132	1945	5.30
	2008	0.35	151717	131	1870	5.38
	2009	0.32	151717	131	1859	5.49
	2010	0.34	146730	131	1874	5.77
	2011	0.35	146730	131	1890	5.95
	2012	0.34	146730	131	2003	5.88
	2013	0.36	146730	131	2014	6.71
	2014	0.32	146730	117	1865	5.67
	2015	0.32	146730	257	1272	6.12

Unit: Sekolah (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA)
Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling)